



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO**



LAPORAN KINERJA (LKj)

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

TAHUN 2020

Cibodas, Januari 2021



KATA PENGANTAR



Dengan selesainya Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) tahun 2020 ini, kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Karena hanya atas perkenan-Nya-lah, laporan ini bisa selesai sesuai jadwal.

Balai Besar TNGGP sebagai institusi dengan komitmen yang akuntabel, telah melaksanakan seluruh aktivitas sesuai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Komitmen kinerja yang harus dicapai Balai Besar TNGGP telah dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja, yaitu: Rencana Strategis (Renstra) Balai

Besar TNGGP tahun 2020-2024; dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Balai Besar TNGGP yang merupakan kontrak atau perjanjian kerja yang ditandatangani Kepala Balai Besar TNGGP dan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) yang merupakan satu kesatuan perangkat dokumen perencanaan kinerja yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Balai Besar TNGGP.

Aktualisasi kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kerja/ Penetapan Kinerja Tahun 2020, harus dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban dengan pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan. Laporan pertanggungjawaban ini merupakan gambaran capaian nilai keberhasilan pelaksanaan kinerja Balai Besar TNGGP yang terarah dan fokus pada *output* kegiatan di dalam Renstra Balai Besar TNGGP Tahun 2020 -2024.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban tersebut, baik secara internal maupun eksternal atas pelaksanaan tugas selama satu tahun, Balai Besar TNGGP menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020. Penyusunan laporan ini sesuai dengan yang diamanahkan Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan LKj Balai Besar TNGGP Tahun 2020. Semoga LKj Balai Besar TNGGP ini bermanfaat dalam upaya pengembangan pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Cibodas, Januari 2021
Kepala Balai Besar,



Wahju Rudianto, S.Pi., M.Si.
NIP. 196910181994031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai instansi pemerintah, yang secara organisatoris berada dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) merupakan pelaksana (eksekutor) dari kebijakan Kementerian LHK, khususnya Direktorat Jenderal KSDAE. Sebagai bagian integral dari pembangunan sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan bidang KSDAE, maka pembangunan TNGGP merupakan bagian dan harus mengacu pada kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya bidang KSDAE. Sebagai pelaksana kebijakan, Balai Besar TNGGP telah menyusun Renstra periode tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Ditjen KSDAE, sekaligus kelanjutan dan pengembangan dari kegiatan pada Renstra Balai Besar TNGGP sebelumnya tahun 2015-2019.

Dalam Renstra 2020-2024, tertuang bahwa pencapaian misi, tujuan, sasaran kegiatan serta kebijakan dan kegiatan organisasi selama lima tahun, mengacu pada visi pengelolaan TNGGP. Pernyataan visi pengelolaan TNGGP mengacu sepenuhnya pada visi Ditjen KSDAE sebagai organisasi induk, sehingga visi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah: *"Sebagai Pusat Konservasi Hutan Hujan Tropis Pegunungan di Pulau Jawa yang Bermanfaat untuk Mendukung Pembangunan Wilayah dan Masyarakat"*. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mempertahankan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam rangka meningkatkan populasi satwa macan tutul, owa jawa, surili, elang jawa dan keanekaragaman hayati lainnya untuk menunjang pengembangan pendidikan dan penelitian;
2. Mengembangkan pendakian dan wisata alam lainnya yang berkelanjutan untuk seluruh jenjang umur dan ramah disabilitas; dan
3. Mewujudkan fungsi pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam kerangka Cagar Biosfer Cibodas untuk mendukung pembangunan wilayah dan bagi kehidupan masyarakat.

Sedangkan tujuan pengelolaan untuk mencapai visi dan misi pengelolaan TNGGP adalah:

1. Memulihkan ekosistem yang rusak pada kawasan perluasan TNGGP dalam rangka mempertahankan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa sebagai sistem penyangga kehidupan;
2. Melindungi dan mengamankan kawasan TNGGP;
3. Terwujudnya sumberdaya manusia berwawasan lingkungan;
4. Terwujudnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan TNGGP;
5. Meningkatkan upaya-upaya pengelolaan tumbuhan, owa jawa, macan tutul, elang jawa dan satwa liar lainnya;
6. Membangun data dan informasi serta sistem monitoring keanekaragaman hayati;
7. Mewujudkan aktivitas pendakian dan wisata alam lainnya yang berkelanjutan;
8. Mewujudkan destinasi pendakian yang berkualitas, aman dan nyaman;
9. Meningkatkan pemanfaatan air; dan
10. Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati TNGGP.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pengelolaan kawasan konservasi dalam periode tahun 2020-2024, ditetapkan arah sasaran sebagai berikut:

- 1) Penataan zonasi kawasan konservasi;
- 2) Optimalisasi fungsi kawasan konservasi;
- 3) Penguatan data dan informasi;
- 4) Penguatan kerjasama;
- 5) Peningkatan efektivitas pengelolaan;
- 6) Perencanaan pengelolaan;
- 7) Pemulihan ekosistem;
- 8) Pembinaan kawasan penyangga;
- 9) Pembinaan zona tradisional;
- 10) Perlindungan dan pengamanan kawasan;
- 11) Peningkatan populasi spesies terancam punah;
- 12) Data sebaran keanekaragaman hayati;
- 13) Pembinaan *sanctuary*;
- 14) Penambahan wisatawan mancanegara;
- 15) Penambahan wisatawan nasional;
- 16) Penambahan unit usaha wisata alam;
- 17) Pemanfaatan jasa air;

- 18) Penguatan kader konservasi;
- 19) Akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan.

Menjawab permasalahan, tantangan, dan *issue strategis* pengelolaan Balai Besar TNGGP pada kurun waktu 2020-2024, maka sasaran-sasaran kegiatan (*output*) Balai Besar TNGGP dijabarkan secara realistis dan jelas ke dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terukur dan diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2020 Balai Besar TNGGP telah menyelenggarakan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dengan satu kegiatan yaitu kegiatan Pengelolaan Taman Nasional, sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Terjaminnya Efektivitas Pengelolaan Taman Nasional.

Secara umum Balai Besar TNGGP telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai. Evaluasi pencapaian kinerja BBTNGGP tahun 2020, dilakukan melalui pengukuran terhadap 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) seperti yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian/ Penetapan Kinerja (PK) tahun 2020.

Beberapa kesimpulan strategis atas pelaksanaan kinerja Balai Besar TNGGP tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Balai Besar TNGGP yang tersedia pada tahun 2020 sebesar Rp.30.158.567.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi		
			Rp.	% Keu	% Fisik
1.	Rupiah Murni (RM)	21,644,067,000	21,064,009,435	97.32	100,00
2.	PNBP	3,372,500,000	3,364,356,213	99.76	100,00
3	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	5,142,000,000	5,138,647,000	99.93	100,00
Jumlah		30,158,567,000	29,567,012,648	98.04	100,00

2. Berdasarkan alokasi Anggaran DIPA Balai Besar TNGGP Tahun 2020, pagu dan realisasi anggaran per kegiatan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% KEU
1	Luas Kawasan sebagai penyedia Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi	27.250.000	26.650.000	97,80
2	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	184.320.000	183.030.000	99,30
3.	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	1.739.966.000	1.738.122.754	99,89
4.	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	203.510.000	202.439.500	99,47
5.	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1.116.575.000	1.109.869.536	99,40
6.	Konservasi Spesies dan Genetik	582.675.000	582.003.000	99,88
7.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	535.400.000	533.883.059	99,72
8.	Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN	5.142.000.000	5.138.647.000	99,93
9.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	20.626.871.000	20.052.367.799	97,21
TOTAL		30.158.567.000	29.567.012.648	98,04

3. Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, diketahui bahwa tingkat capaian kinerja kegiatan BBTNGGP tahun 2020 dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan, sebesar 118,65 %, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian %
1.	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi seluas 4.935 Ha	100,00
2.	Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan sebanyak 1 Dokumen	150,00
3.	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani seluas 50 Ha	100,00
4.	Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif sebanyak 1 desa	150,00
5.	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sebanyak 1 kawasan konservasi	100,00
6.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 8 Ha	150,00
7.	Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> sebanyak 1 destinasi	100,00
8.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 80 poin	99,21
Capaian Rata-rata		118,65

Capaian kinerja Balai Besar TNGGP pada tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan untuk IKK "Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan" bernilai lebih dari 100%. Hal ini karena capaian dokumen yang tersusun sebanyak 2 dokumen (Revisi Zonasi TNGGP dan Desain Tapak Lebak Ciherang).

Begitu juga dengan IKK "Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif" bernilai lebih dari 100%. Hal ini karena capaian desa penyangga yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/ zona tradisional sebanyak 10 desa.

Serta IKK "Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif" bernilai lebih dari 100 %. Hal ini karena kegiatan monitoring 3 (tiga) spesies satwa prioritas selain dilakukan pada *site monitoring*, juga dilakukan di luar *site monitoring* sehingga luas capaian 33,604 Ha.

Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar TNGGP menyajikan: Pencapaian target strategis selama 1 (satu) tahun yang telah ditetapkan dalam Perjanjian/ Penetapan Kinerja Tahunan. Capaian strategis tercermin dalam capaian kinerja kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Analisis atas capaian kinerja 1 (satu) tahun, serta efisiensi penggunaan sumber daya anggaran atas sasaran kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Disamping itu diuraikan pula faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian kinerja.

Capaian Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2020

Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam



Luas Kawasan (4,4 juta Ha)

TARGET
4.935 Ha



REALISASI
4.935 Ha
100%

4 Simpul Desa
Keekaragaman Hayati
yang dikembangkan

TARGET
1 Dokumen



REALISASI
2 Dokumen
150%

Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru

Luas *Opened* (1,8 juta Ha)

TARGET
50 Ha



REALISASI
50 Ha
100%

Jumlah Desa (500 desa/ 50.000 Ha)

TARGET
1 Desa



REALISASI
10 Desa
150%

Jumlah Kawasan Konservasi (132 KK)

TARGET
1 kawasan
Konservasi



REALISASI
1 kawasan
Konservasi
100%

Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik

Luas Kawasan Hutan (15,6 Juta Ha)

TARGET
8 Ha



REALISASI
33.604 Ha
150%

Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi

Jumlah 7 Destinasi Wisata

TARGET
1 Destinasi



REALISASI
1 Destinasi
100%

Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE

Nilai SAKIP 78 Point

TARGET
80 Poin



REALISASI
79,37 Poin
99,21%



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Kelembagaan	
1. Kedudukan	3
2. Tugas dan Fungsi	3
3. Struktur Organisasi	3
C. Sumber Daya dan Sarana Pendukung	
1. Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango	5
2. Sumber Daya Manusia	6
3. Sarana dan Prasarana	7
D. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issue</i>)	8
E. Sistematika Penyajian	11
 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 12
A. Rencana Strategis	12
1. Visi dan Misi Tahun 2020 – 2024	12
2. Tujuan	13
3. Sasaran	13
4. Program	13
5. Kegiatan	14
B. Target Jangka Menengah 2020 - 2024.....	14
C. Target Tahun 2020.....	15
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	18
2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020	19
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 20
A. Capaian Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2020.....	21
1. Capaian Kinerja per IKK	21
2. Realisasi Anggaran	78
B. Capaian Indikator Tujuan	83
C. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional	84
 BAB IV. PENUTUP	 86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	 89



DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
1.	Luas Zonasi TNGGP Sesuai dengan Pengesahan Zonasi Tahun 2016	6
2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	7
3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	7
4.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia Tahun 2020.....	8
5.	Nilai Perolehan Aset/Barang Milik Negara Tahun 2020	8
6.	Matrik Isue Strategis dan Prioritas Balai Besar TNGGP Tahun 2020	9
7.	Matrik Target Renstra Balai Besar TNGGP Tahun 2020 – 2024	15
8.	Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020	18
9.	Rekapitulasi Capaian Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2020	21
10.	Target dan Realisasi IKK Luas Kawasan Konservasi sebagai Penyedia Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di Dalam Kawasan Konservasi Balai Besar TNGGP Tahun 2020	22
11.	Target dan Realisasi Kegiatan Penunjang IKK Luas Kawasan Konservasi sebagai Penyedia Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di Dalam Kawasan Konservasi Balai Besar TNGGP Tahun 2020	22
12.	Target dan Realisasi IKK Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan Tahun 2020	26
13.	Target dan Realisasi Kegiatan Penunjang IKK Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan Tahun 2020	27
14.	Hasil Review Zonasi TNGGP	28
15.	Target dan Realisasi IKK Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani Balai Besar TNGGP Tahun 2020	32
16.	Target dan Realisasi Kegiatan Pendukung IKK Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani Balai Besar TNGGP Tahun 2020.....	33
17.	Target dan Realisasi IKK Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Balai Besar TNGGP Tahun 2020.....	38
18.	Target dan Realisasi Kegiatan Penunjang IKK Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Balai Besar TNGGP Tahun 2020.....	39
19.	Target dan Realisasi IKK Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya Balai Besar TNGGP Tahun 2020.....	46
20.	Target dan Realisasi Kegiatan Penunjang IKK Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya Balai Besar TNGGP Tahun 2020.....	46
21.	Target dan Realisasi IKK Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif Balai Besar TNGGP Tahun 2020.....	55
22.	Target dan Realisasi Kegiatan Pendukung IKK Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif Balai Besar TNGGP Tahun 2020.....	56
23.	Populasi Jenis Terancam Punah di Balai Besar TNGGP Tahun 2015-2020.....	



24. Perkembangan Jumlah Owa Jawa di Sanctuary JGC Tahun 2015-2020.....	58
25. Target dan Realisasi IKK Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary</i> , Balai Besar TNGGP Tahun 2020.....	61
26. Target dan Realisasi Kegiatan Penunjang IKK Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary</i> , Balai Besar TNGGP Tahun 2020.....	66
27. Target dan Realisasi IKK Nilai SAKIP Balai Besar TNGGP Tahun 2020.....	67
28. Target dan Realisasi Kegiatan Pendukung IKK Nilai SAKIP Balai Besar TNGGP Tahun 2020.....	73
29. Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran/ DIPA KSDAE Tahun 2020.....	73
30. Akuntabilitas Keuangan BBTNGGP Tahun 2020	78
31. Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja BBTNGGP Tahun 2020.....	80
32. Besarnya Serapan Anggaran DIPA BBTNGGP Tahun 2015 – 2020	82
33. Capaian Indikator Tujuan	82
	83



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.	Pemandangan Gunung Pangrango dari Gunung Gede	1
2.	Kantor Balai Besar TNGGP	2
3.	Bagan Struktur Organisasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sesuai Surat Keputusan Menteri LHK P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Nomor SK.120/IV-T.11/BT.5/2016 tanggal 21 Maret 2016	4
4.	Persentase Luas Zonasi	6
5.	Rakor Cagar Biosfer Cibodas Tahun 2020	22
6.	Pembahasan Revisi Zonasi TNGGP	26
7.	Penanaman Pohon Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem di Tapos Bogor	31
8.	Aktivitas Pemanfaatan di Zona Tradisional	37
9.	Patroli di Tingkat Resort Seksi PTN Wilayah V.....	44
10.	Elang Jawa di Blok Geger Bentang Cianjur.....	54
11.	Populasi Jenis Terancam Punah pada Setiap Site Monitoring di TNGGP.....	57
12.	Sanctuary Owa Jawa JGC Bodogol	60
13.	Capain PNPB Balai Besar TNGGP Tahun 2020.....	65
14.	Pusat Pendidikan Konservasi Elang Jawa Cimungkad	68
15.	Input Data Laporan SIDAK KSDAE i	72
16.	Grafik Jumlah Kegiatan Pendukung dan Nilai Sakip BBTNGGP Tahun 2015 – 2020.....	74
18.	Grafik Jumlah Kunjungan Wisata Nusantara ke TNGGP Tahun 2016 - 2020	
19.	Input Data Laporan SIDAK KSDAE	
20.	Kegiatan Pendukung dan Nilai Sakip BBTNGGP Tahun 2020	
21.	Capaian Nilai Sakip Ditjen KSDAE Tahun 2020	



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Uraian	Halaman
1.	Matrik Rencana Strategis BBTNGGP 2020-2024	89
2.	Penetapan Kinerja Tahun 2020	94
3.	Matrik Renja Balai Besar TNGGP Tahun 2020	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Gambar 1. : Pemandangan Gunung Pangrango dari Gunung Gede

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, disebutkan bahwa Taman Nasional merupakan salah satu Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Dengan demikian Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mempunyai fungsi yang lengkap, yaitu perlindungan sistem penyangga

kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis hayati beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Oleh karena itu Balai Besar TNGGP mempunyai tugas dan fungsi utama untuk melindungi sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis hayati beserta ekosistemnya, dan menyediakan sumber daya alam hayati untuk pemanfaatan secara berkelanjutan. TNGGP juga merupakan bagian dari jaringan kawasan konservasi Indonesia, yang sejak tahun 1800-an telah dikenal sebagai tempat yang penting untuk penelitian botani, hingga saat ini.

Dengan fungsi dan manfaat TNGGP yang penting seperti tersebut di atas, maka Balai Besar TNGGP, sebagai instansi pemerintah yang diberi tanggung jawab untuk mengelola kawasan konservasi, terus meningkatkan kegiatan pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, agar tetap berfungsi dan bermanfaat secara lestari bagi kepentingan masyarakat. Sebagai pelaksana pengelolaan aset negara, Balai Besar TNGGP terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal melalui berbagai kegiatan teknis maupun administrasi dengan mengacu pada Rencana

Strategis (Renstra) Balai Besar TNGGP tahun 2020–2024, dan mempertimbangkan perkembangan dan kondisi saat ini.

Sebagai pengelola aset negara, Balai Besar TNGGP yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen KSDAE, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai kebijakan yang diemban berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan, berupa laporan pertanggungjawaban yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj). Untuk itu, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintah, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menyusun Laporan Kinerja (LKj.).

Laporan Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2020 ini, menyajikan uraian pengukuran keluaran atau hasil kegiatan-kegiatan dari program capaian sasaran Strategis, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dalam rangka memenuhi target-target yang telah direncanakan untuk tahun 2020 dalam rangka mewujudkan visi dan misi pengelolaan TNGGP, analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran, serta kendala-kendala yang dihadapi dan langkah-langkah untuk menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi.

B. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, BBTNGGP memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:



Gambar 2. : Kantor Balai Besar TNGGP

B.1. Kedudukan

Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah organisasi pelaksana teknis pengelolaan taman nasional yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar. Kepala Balai Besar TNGGP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

B.2. Tugas dan Fungsi

Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar TNGGP menyelenggarakan fungsi:

- a. Penataan zonasi, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan taman nasional;
- b. Pengelolaan kawasan taman nasional;
- c. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan kawasan taman nasional;
- d. Pengendalian kebakaran hutan;
- e. Promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. Kerja sama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
- h. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan taman nasional;
- i. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
- j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

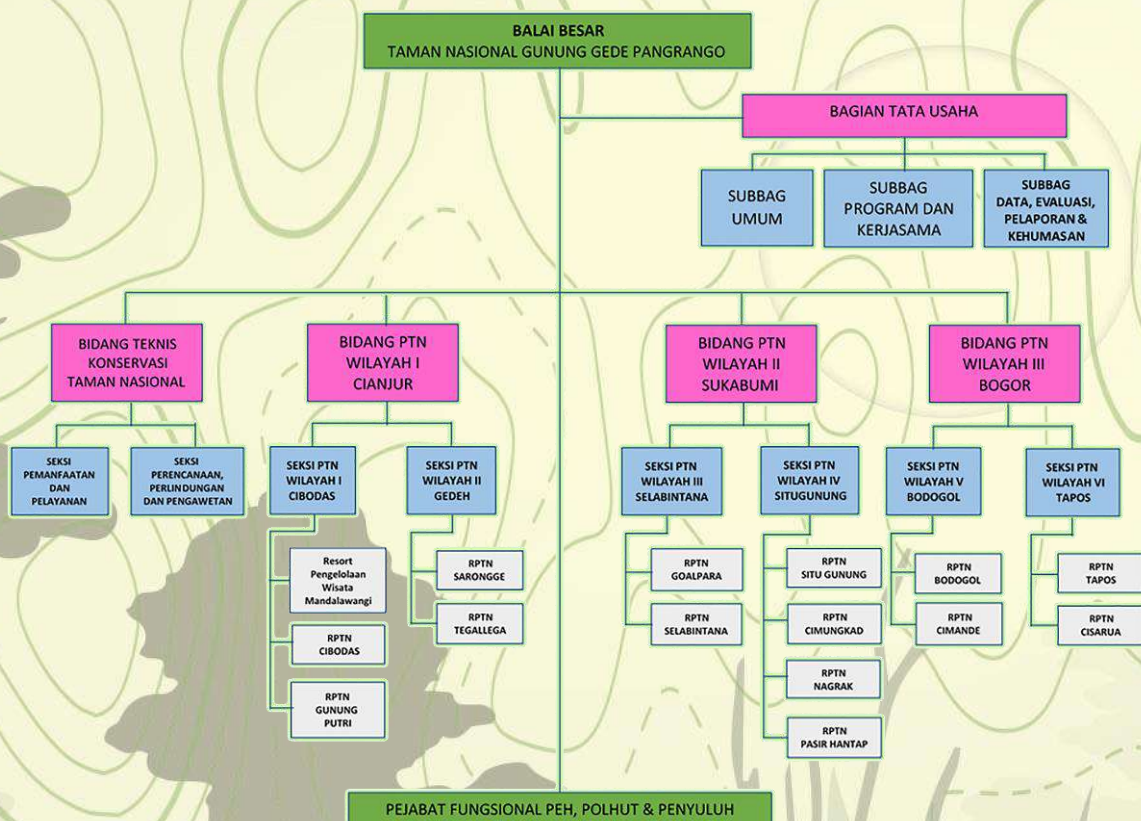
B.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) termasuk Tipe A setingkat eselon II b. Struktur organisasinya terdiri

atas: Kepala Balai Besar TNGGP dibantu oleh 2 (dua) pejabat eselon III b yang berkedudukan di Kantor Balai Besar, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang Teknis Konservasi, 3 (tiga) Pejabat eselon IV non teknis (Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama, serta Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan), dan 2 (dua) Pejabat eselon IV teknis (Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan serta Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan) di bawah Bidang Teknis Konservasi. Di lapangan dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat eselon III b di wilayah yaitu Kepala Bidang Pengelolaan TN Wilayah I Cianjur, Kepala Bidang Pengelolaan TN Wilayah II Sukabumi dan Kepala Bidang Pengelolaan TN Wilayah III Bogor, dan 2 Pejabat eselon IV sebagai Kepala Seksi untuk masing-masing bidang wilayah.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar TNGGP Nomor SK.120/IV-T.11/BT.5/2016 tanggal 21 Maret 2016, Kepala BBTNGGP dibantu oleh 15 (lima belas) Kepala Resort PTN (Resort PTN Cibodas, Gunung Putri, Sarongge, Tegalle, Goalpara, Selabintana, Situgunung, Cimungkad, Nagrak, Pasir Hantap, Bodogol, Cimande, Tapos, dan Cisarua) yang menyebar di tiga bidang wilayah dan pada masing-masing seksi wilayah dan 1 (satu) Kepala Resort Pengelolaan Wisata Mandalawangi di Seksi PTN Wilayah I Cibodas, Bidang PTN Wilayah I Cianjur. Setiap resort dialokasikan sebanyak 3-6 orang petugas disesuaikan dengan tingkat permasalahannya. Tugas Kepala Resort adalah mengkoordinir pengamanan di dalam kawasan, seperti kegiatan patroli (rutin, fungsional, dan gabungan), serta tugas keluar kawasan seperti pembinaan ke masyarakat dan penyuluhan. Penyebaran pegawai hingga ke tingkat resort, merupakan kebijakan dari pengelola dalam upaya menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi dan perkembangan di lapangan agar dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu juga mewujudkan petugas yang dekat dengan masyarakat dan memahami permasalahan sosial masyarakat sekaligus menumbuhkan kebanggaan rasa kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama melindungi keutuhan dan keberadaan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

Berikut adalah gambar bagan struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. : Bagan Struktur Organisasi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Nomor SK.120/IV-T.11/BT.5/2016 tanggal 21 Maret 2016

C. Sumber Daya dan Sarana Pendukung

C.1. Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

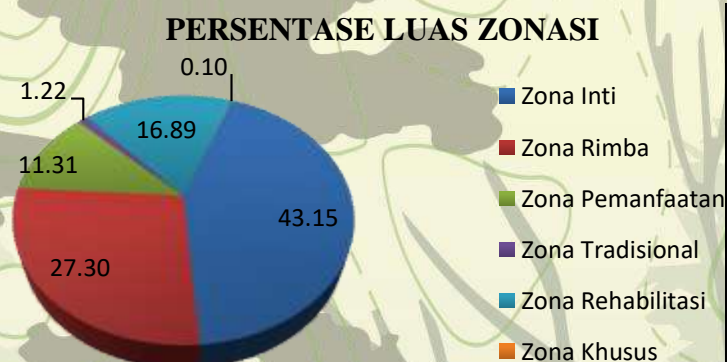
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK 3683/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan TNGGP di Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi Propinsi Jawa Barat luas kawasan TNGGP adalah 24.270,80 ha.

Secara administrasi pemerintahan, kawasan Taman Nasional ini termasuk pada tiga wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur, Sukabumi dan Bogor. Dengan demikian pengelolaan TNGGP dibagi ke dalam 3 (tiga) bidang wilayah pengelolaan, yaitu:

- Bidang PTN Wilayah I Cianjur, yang termasuk DAS Citarum;
- Bidang PTN Wilayah II Sukabumi, termasuk DAS Cimandiri;
- Bidang PTN Wilayah III Bogor, termasuk DAS Ciliwung Cisadane.

Dalam teknis pengelolaannya, kawasan TNGGP dibagi ke dalam 6 (enam) zonasi, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE No. SK.356/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Zonasi TNGGP Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat, yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona rehabilitasi, zona tradisional, dan zona khusus. Luas masing-masing zona bisa dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Luas Zonasi TNGGP Sesuai dengan SK Dirjen KSDAE No. SK 356/KSDAE/Set/KSA.0/9/2016



Gambar 4. Persentase Luas Zonasi

Zonasi	Luas (ha)
Zona Inti	10.475,57
Zona Rimba	6.628,49
Zona Pemanfaatan	2.745,69
Zona Rehabilitasi	4.100,21
Zona Tradisional	297,17
Zona Khusus	23,67
Luas Seluruhnya	24.270,80

C.2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar TNGGP pada akhir tahun 2020, sebanyak 159 orang, yang terdiri dari PNS 112 orang dan PPNPN 47 orang, yang menyebar di 3 (tiga) bidang wilayah dan kantor Balai Besar. Komposisi pegawai didominasi oleh laki-laki (70,44 %). Untuk jelasnya bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

Jenis Kelamin	Kedudukan				Jumlah
	Kantor BBTNGGP	Bid. PTN Wil. I	Bid. PTN Wil. II	Bid. PTN Wil. III	
Perempuan	15	8	7	9	39
Laki-laki	38	29	32	21	120
Total	53	37	39	30	159

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019) jumlah pegawai Balai Besar TNGGP mengalami penurunan sebanyak 7 orang (pensiun). Pada tahun 2020 terjadi penurunan tingkat SLTA, S1 dan SD, mengalami penambahan lulusan S2 dan D3. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015 – 2020

No.	Tahun	S3	S2	S1/D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jml
1.	2015	0	11	42	15	88	3	6	165
2.	2016	0	14	38	14	87	3	6	162
3.	2017	0	15	37	18	78	6	5	159
4.	2018	0	14	41	21	71	5	8	160
5.	2019	0	15	41	22	73	9	6	166
6.	2020	0	15	43	25	65	5	6	159

Pada tahun 2020, pegawai TNGGP didominasi oleh lulusan SLTA (40,88 %), dalam kurun waktu enam tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif stabil. Tingkatan S1 menduduki ranking dua (27,04 %) dan D3 menduduki ranking tiga (15,72 %) dengan kecenderungan stabil dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Tingkatan S2 ada 15 personil (9,43 %) dan cenderung stabil. Sedangkan tingkatan SLTP berjumlah 5 Personil (3,77 %) dan SD berjumlah 6 personil (3,14 %).

C.3. Sarana dan Prasarana

Aset atau Barang Milik Negara Intrakomtabel dan ekstrakompatabel yang dikelola oleh Balai Besar TNGGP per 31 Desember 2020 dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi mencapai Rp. 58.322.836.484,-, kondisi nilai perolehan aset/ BMN lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5.

Table 5. Nilai Perolehan Aset/ Barang Milik Negara Tahun 2016 - 2020

TAHUN	NILAI ASET (Rp)	ASET TETAP (Rp)	ASET ANCAR (Rp)	PIUTANG JANGKA PANJANG (Rp)	ASET LAINNYA (Rp)
2016	22.986.130.393,-	20.740.692.177,-	486.426.850,-	0,-	1.759.011.366,-
2017	30.494.832.936,-	30.086.431.736,-	139.927.200,-	0,-	268.474.000,-
2018	59.545.784.487,-	58.150.245.534,-	137.949.150,-	0,-	1.257.589.803,-
2019	57.284.782.470,-	55.986.402.474,-	96.073.940,-	0,-	1.202.306.056,-
2020	58.322.836.484,-	57.086.224.874,-	100.578.175,-	5.930.200,-	1.130.103.235,-

Nilai tersebut telah dihitung berdasarkan penyusutannya per tanggal 01 Januari 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.1/PMK.06/ 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara lebih rinci aset Balai Besar TNGGP tahun 2020 terdiri atas:

a. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap dengan saldo per 31 Desember 2020. Barang Milik Negara Intrakomtabel sebesar Rp. 57.086.224.874,-.

b. Aset lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, yaitu berupa kas, piutang dan persediaan. Nilai aset lancar Balai Besar TNGGP per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 100.578.175,-.

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang ini berupa tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi (*Netto*) sebesar Rp 5.930.200,-.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antara lain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Balai Besar TNGGP per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.130.103.235,-

D. Permasalahan Utama

Issue strategis pengelolaan TNGGP yang dihadapi pada tahun 2020, meliputi masalah yang menyangkut: Revolusi Mental, Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus, Pembangunan Pariwisata Alam, serta Desa dan Kawasan Pedesaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Table 6. Matrik Issue Strategis dan Prioritas Balai Besar TNGGP Tahun 2020

No.	Permasalahan Strategis	Usulan Langkah Tindak Lanjut	Solusi dan Pemikiran
1.	Pemutakhiran data dan informasi masih belum optimal	Tersedianya anggaran kegiatan penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi sebesar Rp. 163.250.000,-	Membangun database
2.	a. Terdapat beberapa lokasi pada zona tertentu membutuhkan untuk dilakukan penyesuaian fungsi b. Belum optimalnya pemanfaatan zona pemanfaatan sebagai ruang usaha dan publik c. Peningkatan Konsep <i>Community Development</i> di daerah penyangga BBTNGGP masih perlu ditingkatkan d. Perlindungan dan Pengamanan berbasis Resort bersama Masyarakat untuk perlindungan kawasan dan biodiversitas masih perlu ditingkatkan	Tersedianya anggaran Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi sebesar Rp. 2.932.186.000,-	a. Review Zonasi b. Penyusunan desain tapak c. Pendampingan dan Pembinaan kelompok masyarakat binaan di daerah penyangga d. Perlindungan dan Pengamanan berbasis Resort bersama masyarakat dan mitra
3.	Pemutakhiran Data dan Pembinaan Habitat Satwa Prioritas belum optimal/ belum dapat menggambarkan populasi keseluruhan kawasan TNGGP	Tersedianya anggaran kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik sebesar Rp 493.375.000,-	Selain dilakukan monitoring rutin pada <i>site monitoring</i> juga dilakukan perluasan area monitoring

No.	Permasalahan Strategis	Usulan Langkah Tindak Lanjut	Solusi dan Pemikiran
	(baru site monitoring)		terutama untuk 3 jenis satwa prioritas
4.	<i>Sustainable Tourism Development</i>	Tersedianya anggaran Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi sebesar Rp. 510.620.000,-	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan bahan publikasi dan promosi serta b. Publikasi dan promosi kawasan konservasi melalui berbagai event kegiatan terutama secara virtual/online
5.	Sarana dan prasarana pendukung wisata pendidikan belum memadai/ ekowisata	Tersedianya anggaran kegiatan Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN sebesar Rp 5.142.000.000,-	Pembangunan Sarana Prasarana Ekowisata Model SBSN di Resort Cimungkad (Pusat Pendidikan Konservasi Elang Jawa Cimungkad)
6.	Pandemi Covid-19	Tersedianya anggaran kegiatan penanganan covid – 19 sebesar Rp 1.151.155.000,-	<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (makanan penambah daya tahan tubuh, Alat Perlindungan Diri, dan lain-lain) b. Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (bahan sosialisasi) c. Pemeriksaan kesehatan
7.	Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja UPT dalam rangka Reformasi Birokrasi belum maksimal	Tersedianya anggaran Kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan Output Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker sebesar Rp. 19.765.981.000,-	Peningkatan layanan: <ul style="list-style-type: none"> a. Layanan dukungan manajemen b. Layanan sarana dan prasarana internal c. Layanan perkantoran

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020 adalah sebagai berikut ini:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK/ GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat mandat yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi) yang dijabarkan ke dalam A) Latar belakang, B) Kelembagaan, C) Sumberdaya dan Sarana Pendukung, D) Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) dan, sebagai *review* batang tubuh Laporan disajikan dalam sub E) Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijelaskan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja yang terdiri dari sub: A) Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, merupakan uraian singkat tentang instansi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta kebijakan dan program BBTNGGP ; B) Target Jangka Menengah; dan C) Target Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini dijelaskan tentang : A) Capaian Kinerja Organisasi, yang menyajikan capaian kinerja BBTNGGP untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja BBTNGGP, dan analisis capaian kinerja setiap pernyataan kinerja, membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya dan standar Ditjen KSDAE; Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif solusi, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran; B) Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi penggunaan anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan secara umum tentang capaian kinerja BBTNGGP selama tahun 2020 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

Berisi : 1. Matrik Rencana Strategis BBTNGGP 2020-2024; 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020; 3. Rencana Kerja Balai Besar TNGGP Tahun 2020.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), senantiasa berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Strategis atau RENSTRA (2020 – 2024), Penetapan Kinerja (2020), dan Rencana Kerja dan Anggaran (2020). Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dan berhasil secara akuntabel, efektif, dan efisien.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) BBTNGGP Tahun 2020 – 2024 (dapat dilihat pada lampiran 1) disusun sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan dan kegiatan BBTNGGP untuk pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan, sasaran strategis, serta kebijakan dan program organisasi pada tahun 2020-2024.

1. Visi dan Misi

Visi:

Visi yang ingin dicapai 5 (lima) tahun ke depan dalam pengelolaan TNGGP adalah: "Sebagai Pusat Konservasi Hutan Hujan Tropis Pegunungan di Pulau Jawa yang Bermanfaat untuk Mendukung Pembangunan Wilayah dan Masyarakat".

Misi:

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mempertahankan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan sebagai sistem penyangga kehidupan yang menunjang pengembangan pendidikan dan penelitian;
2. Mempertahankan populasi owa jawa, macan tutul, dan elang jawa;
3. Mewujudkan fungsi pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam ekosistem hutan hujan tropis pegunungan dalam kerangka Cagar Biosfer Cibodas untuk mendukung pembangunan wilayah dan kehidupan masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan pengelolaan untuk mencapai visi dan misi pengelolaan TNGGP periode 2020-2024 adalah:

1. Memulihkan ekosistem yang rusak pada kawasan perluasan TNGGP dalam rangka mempertahankan perwakilan tipe ekosistem hutan hujan tropis pegunungan di Pulau Jawa sebagai sistem penyangga kehidupan;
2. Melindungi dan mengamankan kawasan TNGGP;
3. Terwujudnya sumberdaya manusia berwawasan lingkungan;
4. Terwujudnya peran dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan TNGGP;
5. Meningkatkan upaya-upaya pengelolaan tumbuhan, Owa Jawa, Macan Tutul, Elang Jawa dan satwa liar lainnya;
6. Membangun data dan informasi serta sistem monitoring keanekaragaman hayati;
7. Mewujudkan aktifitas pendakian dan wisata alam lainnya yang berkelanjutan;
8. Mewujudkan destinasi pendakian yang berkualitas, aman dan nyaman;
9. Meningkatkan pemanfaatan air;
10. Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati TNGGP.

3. Sasaran

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pengelolaan kawasan konservasi dalam periode tahun 2020-2024, ditetapkan arah sasaran sebagai berikut:

1. Luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Jumlah nilai PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL;
3. Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif;
4. Jumlah Kawasan Konservasi dan Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya.

4. Program

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka pada tahun 2020, BBTNGGP melaksanakan program pembangunan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu, **"PROGRAM**

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM”, yang merupakan programnya DITJEN KSDAE.

5. Kegiatan

Dalam mencapai sasaran program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, BBTNGGP melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional. Dalam Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional ini mencakup 5 (lima) kegiatan lingkup Ditjen KSDAE, yaitu:

1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam;
2. Kegiatan pengelolaan kawasan konservasi;
3. Kegiatan konservasi spesies dan genetik;
4. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi;
5. Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.

B. Target Jangka Menengah (2020-2024)

Sebagai pedoman dan arah pengelolaan TNGGP selama periode lima tahun telah dibuat rencana strategis (Renstra). Untuk lebih memudahkan pelaksanaannya dalam Renstra telah dibuat target-target yang harus dicapai selama periode Renstra yang bersangkutan. Renstra UPT merupakan penjabaran dari Renstra induknya (eselon I), sehingga Renstra UPT ditujukan untuk pencapaian target Renstra di atasnya.

Sebagai UPT dari DITJEN KSDAE, maka Renstra Balai Besar TNGGP merupakan penjabaran dan ditujukan untuk pencapaian target-target Renstra DITJEN KSDAE. Oleh karena itu target kinerja dan indikator kinerja kegiatannya merupakan bagian dari target dan indikator kinerja kegiatan yang telah digariskan Ditjen KSDAE. Secara umum target kegiatan dan indikator kinerja kegiatan selama periode Renstra Balai Besar TNGGP tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada Tabel 7, untuk lebih rincinya bisa dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 7. Matrik Target Renstra Balai Besar TNGGP Tahun 2020 – 2024

Kode	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Program 1 : Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati							
IKP.1	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Hektar					
IKK.1	Luas KK sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di Dalam Kawasan Konservasi Darat dan Perairan	Hektar	22.000 Ha				
a	Pemetaan potensi keanekaragaman hayati		2.000 Ha	5.000 Ha	5.000 Ha	5.000 Ha	5.000 Ha
b	Updating data keanekaragaman hayati			15 Resort	15 Resort	15 Resort	15 Resort
c	Monitoring populasi macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa			15 Resort	15 Resort	15 Resort	15 Resort
d	Monitoring habitat macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa			15 Resort	15 Resort	15 Resort	15 Resort
e	Monitoring kecukupan satwa mangsa macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa			15 Resort	15 Resort	15 Resort	15 Resort
f	Pembinaan habitat macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa			15 Resort	15 Resort	15 Resort	15 Resort
g	Membangun jejaring kerja dan kemitraan penelitian			4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
h	Peningkatan kapasitas SDM dalam monitoring Keanekaragaman hayati		1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
i	Melakukan kajian daya dukung			1 Kali		1 Kali	
j	Penyusunan dokumen perencanaan wisata alam			1 Keg		1 Keg	
IKK.2	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	Hektar	22.000 Ha				
a	Perlindungan dan pengaman kawasan		22.000 Ha	22.000 Ha	22.000 Ha	22.000 Ha	22.000 Ha
IKK.3	Jumlah Luas area KK yang ditangani melalui kemitraan & Pemulihan Ekosistem	Hektar	2.000 Ha				
a	Pemulihan Ekosistem		400 Ha	400 Ha	400 Ha	400 Ha	400 Ha
Sasaran Program 3 : Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari							
IKP.3	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan	Rupiah					

Kode	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Konservasi dan TSL						
IKK.1	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Unit	1 unit kawasan konservasi				
a	Membangun dan mengelola sanctuary Elang Jawa		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
b	Mengelola 1 unit <i>sanctuary</i> Owa Jawa		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
c	Pembuatan Demplot penangkaran dan pemanfaatan 2 jenis kehati untuk kesejahteraan masyarakat			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
IKK.2	Jumlah unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	Unit	15 unit/ resort				
a	Monitoring debit air		3 unit/ resort	3 unit/ resort	3 unit/ resort	3 unit/ resort	3 unit/ resort
b	Sosialisasi pemanfaatan air		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
c	Pembentukan dan pembinaan kelembagaan pemanfaatan air			1 Unit	1 Unit	1 Unit	
Sasaran Program 4 : Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi							
IKP.4	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa					
IKK.1	Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	5 Desa				
a	Membina masyarakat menjadi Intepreter profesional		1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa
b	Kerjasama pemanfaatan HHBK di Zona Tradisional		1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa
c	Peningkatan kapasitas masyarakat		1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa
d	Pengembangan daerah penyangga dengan materi kehati TNGGP		1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa
e	Pembinaan masyarakat pendukung wisata alam		1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa
f	Menjalin kerjasama penelitian terkait pemanfaatan 2 jenis		1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa

Kode	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	kehati untuk kesejahteraan masyarakat						
g	Pengembangan jejaring kerja dan kelompok pembelajar		1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa
IKP.5	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KK					
IKK.1	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KK	1 unit kawasan konservasi				
a	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan konservasi		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
b	Pendidikan Konservasi dan Lingkungan (DIKOLING)		3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali
c	Penyuluhan		1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
d	Membentuk Kader Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat			3 Kali			
e	Pengadaan Sarana Prasarana Wisata Alam yang ramah pada penyandang difabel			1 Paket			
f	Penerapan ISO 14001-2015			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
g	Promosi dan penyadartahuan masyarakat		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
h	Penyempurnaan sistem pelayanan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
i	Penyempurnaan SOP keamanan pendakian			1 Kali		1 Kali	
j	Pengadaan sarpras pendakian berstandar internasional dan ramah pada penyandang difabel				1 Paket		
k	Penegakan hukum terhadap pendaki ilegal			1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
l	Penyadartahuan pendaki terkait sampah			1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
m	Menyusun SOP pengelolaan TNGGP berbasis pendidikan konservasi			1 Kali			

C. Target Tahun 2020

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen ini bermanfaat bagi instansi untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, pelaporan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi, dan menilai keberhasilan organisasi dalam periode satu tahun.

Dalam pelaksanaan program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, BBTNGGP telah menetapkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian/ Penetapan Kinerja Tahun 2020. Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Balai Besar TNGGP yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai yang diperjanjikan dalam rangka mencapai target jangka menengah (Renstra), serta Direktur Jenderal KSDAE sebagai pemberi supervisi. Ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020 bisa dilihat pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi	4.935 Ha
2.		Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan	1 Dokumen
3.	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	50 Ha
4.		Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	1 desa
5.		Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1 kawasan konservasi
6.	Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	8 Ha
7.	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi	Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i>	1 destinasi

8.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	80 poin
----	--	---------------------------------------	---------

Perjanjian Kinerja Balai Besar TNGGP dengan Direktur Jenderal KSDAE Tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 2.

2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020

Dalam rangka meningkatkan kinerja (*performance*) dan akuntabilitas (*accountability*) penyelenggaraan pembangunan kehutanan, Balai Besar TNGGP telah menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 sebagai dokumen kerja yang memuat rencana dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun, dan alokasi dana. Untuk efektifitas pencapaian kinerja, diperlukan strategi dan penetapan lokasi yang menjadi target capaian.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan kinerja dan rencana anggaran yang merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan sesuai target kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan. Dengan adanya Rencana Kerja dan Anggaran Balai Besar TNGGP Tahun 2020, diharapkan tercipta suatu tatanan perencanaan yang terukur, transparan, komprehensif, dan bertanggungjawab sebagai perwujudan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pembangunan TNGGP yang profesional dan akuntabel. Daftar Rencana Kerja dan Anggaran Balai Besar TNGGP Tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 3.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengetahui capaian Kinerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dilakukan pengukuran untuk setiap indikator kinerja kegiatan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Balai Besar, serta disupervisi oleh Direktur Jenderal KSDAE, dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2020. Dalam pengukuran ini, dilakukan analisa dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020; Membandingkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir; Membandingkan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Balai Besar TNGGP dan dengan standar nasional; Analisa terhadap penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan serta peningkatan ataupun penurunan kinerja dan solusi alternatifnya; Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; serta analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dengan membandingkan penggunaan dana dengan dana yang tersedia.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan ini, adalah pengukuran capaian kinerja Balai Besar TNGGP selama periode anggaran Tahun 2020. Hasil pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja kegiatan Balai Besar TNGGP tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pencapaian sasaran kegiatan atau sasaran strategis. Evaluasi penilaian, merujuk pada peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 tahun 2011, tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dengan kategori skoring sebagai berikut:

1. AA : > 85 – 100 (Memuaskan);
2. A : > 75 – 85 (Sangat baik);
3. B : > 65 – 75 (Baik, perlu sedikit perbaikan);
4. CC : > 50 – 65 (Cukup baik, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar);
5. C : > 30 – 50 (Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang tidak mendasar);

6. D : > 0 – 30 (Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar).

A. Capaian Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2020

A.1. Capaian Kinerja per IKK

Capaian Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2020 yang merupakan pengukuran pencapaian kinerja instansi, dihitung berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun. Hasil pengukuran kinerja ini memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran kegiatan Balai Besar TNGGP. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Rekapitulasi Capaian Kinerja Balai Besar TNGGP Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target TNGGP	Realisasi	
				Jml	%
1.	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi (4,4 juta Ha)	4.935 Ha	4.935 Ha	100,00
2.		Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan (4 Simpul Data)	1 Dokumen	2 Dokumen	150,00
3.	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani (1,8 Juta Ha)	50 Ha	50 Ha	100,00
4.		Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (500 desa/ 50.000 Ha)	1 desa	10 desa	150,00
5.		Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (132 KK)	1 kawasan konservasi	1 kawasan konservasi	100,00
6.	Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (15,6 juta Ha)	8 Ha	33,604 Ha	150,00
7.	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa	Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic,</i>	1 destinasi	1 destinasi	100,00

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target TNGGP	Realisasi	
				Jml	%
	lingkungan hutan konservasi	<i>Voluntary, Education (7 destinasi)</i>			
8.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 78 poin	80,00 poin	79,37 poin	99,21
Rata-rata Capaian Kinerja					118,65

Analisis capaian kinerja kegiatan ini, menggambarkan tingkat keberhasilan kegiatan pembangunan Balai Besar TNGGP pada tahun 2020 yang didasarkan pada rencana strategi yang telah ditetapkan pada awal tahun. Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, diketahui bahwa tingkat capaian kinerja Balai Besar TNGGP tahun 2020 sebesar **118,65 %**. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan tingkat penyerapan anggaran pembangunan di Balai Besar TNGGP termasuk kategori **Memuaskan**. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10 dan Lampiran 3.

1. Indikator Kinerja Kegiatan 1: Luas Kawasan sebagai Penyedia Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di Dalam Kawasan Konservasi Seluas 4.935 Ha (Target KSDAE 4,4 Juta Ha)



Gambar 5: Rakor Cagar Biosfer Cibodas Tahun 2020

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pengelolaan taman nasional diperlukan adanya perencanaan yang matang yang bersumber dari data informasi kawasan konservasi (TNGGP). Oleh karena itu Balai Besar TNGGP menempatkan kawasan konservasi TNGGP sebagai penyediaan data informasi dan rencana konservasi nasional sebagai salah satu target kinerja kegiatan dalam Renstra Balai Besar TNGGP Tahun 2020-2024. Pada tahun pertama periode Renstra 2020 -2024,

Balai Besar TNGGP menargetkan kawasan konservasi TNGGP sebagai penyedia data informasi seluas 2.000 Ha, dan berhasil mencapai target seluas 4.935 Ha yaitu dalam bentuk kegiatan:

1. Pemantauan fungsi KK melalui Rakor Cagar Biosfer Cibodas
2. Penanganan Covid-19

Dengan demikian capaian **Kinerja Kegiatan Indikator ke-1** ini mencapai **100,00 %** tergolong dalam kategori **Memuaskan**.

Untuk mencapai target IKK ke-1 ini, Balai Besar TNGGP menggunakan anggaran sebesar Rp. 26.650.000,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 27.250.000,-, jadi dalam pencapaian kinerja indikator ke-1 ini terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 600.00,- atau sekitar 2,20 %. Untuk jelasnya bisa dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Target dan Realisasi IKK Luas Kawasan Konservasi sebagai Penyedia Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di Dalam Kawasan Konservasi Balai Besar TNGGP Tahun 2020

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran		Efisiensi (%)
	Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	
Luas Kawasan sebagai penyediaan Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi seluas 4,4 juta Ha	4.935 Ha	4.935 Ha (100,00)	Rp. 27.250.000,-	Rp. 26.650.000,- (97,80)	Rp. 600.000,- (2,20)

Untuk mewujudkan capaian IKK ke-1 ini, dilaksanakan dua kegiatan pendukung, yaitu "Pemantauan fungsi KK melalui Rakor Cagar Biosfer Cibodas" dan "Penanganan Covid-19 ". Kedua kegiatan ini berhasil dikerjakan secara baik, dengan *output* sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11 Target dan Realisasi Kegiatan Penunjang IKK Luas Kawasan Konservasi sebagai Penyedia Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di Dalam Kawasan Konservasi Balai Besar TNGGP Tahun 2020

No.	Jenis Kegiatan	Fisik			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Real.	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Real.
1.	Pemantauan fungsi KK melalui Rakor Cagar Biosfer Cibodas	1 Keg	1 Keg	100	15.630.000	15.030.000	96,16
2.	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3 jenis	3 jenis	100	11.620.000	11.620.000	100,00
Jumlah		2	2	100	27.250.000	26.650.000	97,80

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) adalah salah satu kawasan yang telah diakui sebagai Cagar Biosfer oleh UNESCO dengan nama Cagar Biosfer Cibodas (CBC). Kegiatan "Pemantauan fungsi KK melalui Rakor Cagar Biosfer Cibodas (CBC)" dilaksanakan salah satunya dalam rangka menghimpun data dan informasi kegiatan CBC yang dilaksanakan di kawasan TNGGP.

Balai Besar TNGGP ditunjuk sebagai Sekretariat Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas (FHHP-CBC). Salah satu aksi nyata Balai Besar TNGGP adalah dengan melaksanakan Rapat Koordinasi CBC yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu, untuk tahun anggaran 2020, Balai Besar TNGGP telah melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung kegiatan FKPP-CBC.

Rapat Koordinasi CBC tahun 2020 ini, dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020. Rapat ini dihadiri *stakeholder* yang menjadi bagian dari Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 522.51/Kep.79-Rek/2020 tanggal 6 Februari 2020 tentang FKPP-CBC. Para narasumber yang ikut bagian dalam rapat koordinasi yaitu dari Direktorat Kawasan Konservasi KLHK, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan MAB Indonesia.

Rapat koordinasi membahas beberapa hal terkait pengelolaan CBC, diantaranya adalah:

1. Kebijakan KLHK dalam Pengelolaan Cagar Biosfer di Indonesia
2. Persiapan *Periodic Review UNESCO* Cagar Biosfer Cibodas
3. Penjelasan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang FKPP-CBC

Selain itu dibahas terkait perkembangan kegiatan dari tiap *stakeholder* yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan FKPP-CBC.

Capaian tahun 2020 telah berhasil merealisasikan target Renstra untuk tahun 2020 sebesar 150% (target Renstra 2.000 Ha dan realisasi 4.935 Ha). Sedangkan untuk capaian dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 4.935 Ha (100%). Capaian kinerja sampai tahun 2020 (4.935 Ha) telah merealisasikan target Renstra sampai tahun 2020 (4.935 Ha), sebesar 150%. Sedangkan capaian target Renstra periode 2020 – 2024 sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 22,43% (target 22.000 Ha sudah terealisasi sampai tahun 2020 sebanyak 4.935 Ha).

Untuk target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE periode 2020 - 2024, Luas Kawasan sebagai penyediaan Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi target tahun 2020 seluas 4,4 juta Ha, maka dukungan kinerja Balai Besar TNGGP terhadap Renstra KSDAE sebesar 0,11%.

Proses pengumpulan data, informasi, dan rencana pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mendapat beberapa dukungan, antara lain:

- Dukungan para pihak, baik lembaga pemerintahan (Pemda Kabupaten Cianjur, Bogor dan Sukabumi serta Propinsi Jabar) maupun swasta, yang memberikan sumbangan pemikiran untuk penyusunan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi/ Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- Dukungan berupa sumbangan data dan informasi, untuk melengkapi data yang ada di Balai Besar TNGGP, dari berbagai lembaga terkait, seperti LIPI, Perguruan Tinggi (IPB, UNB, UNIKU, UNSUR, dan lain-lain), Badan Litbang, sehingga ketersediaan data dan informasi tentang kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk penyusunan perencanaan relatif sudah banyak tersedia.
- Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Balai Besar TNGGP sudah cukup baik, latar belakang pendidikan pegawai tingkat S2 cukup banyak (15 orang lulusan dalam dan luar negeri), S1 sebanyak 43 orang, dan tingkat D3 sebanyak 25 orang.

Namun demikian dalam proses pengumpulan data dan informasi ini, masih ditemui berbagai masalah, antara lain:

- Masih rendahnya minat personil/ pegawai dalam mendokumentasikan setiap kegiatan pengelolaan
- Data dan informasi belum terkompilasi secara baik dalam bentuk database.
- Belum ada Sistem Informasi Manajemen (SIM) dari tingkat tapak/ resort sampai balai.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka Balai Besar TNGGP telah melakukan berbagai upaya antara lain:

- Mengingatkan kembali perihal pendokumentasian dan pelaporan data dan informasi melalui Memorandum Kepala Balai Besar.
- Penataan sistem data dan informasi lingkup Balai Besar TNGGP.

Dengan tersusunnya data dan informasi dalam suatu sistem *database* maka pengambilan kebijakan pengelolaan dapat dilakukan berdasarkan data aktual.

2. Jumlah Simpul Data Keanekaragaman Hayati yang Dikembangkan sebanyak 1 Dokumen (Target KSDAE 4 Dokumen)



Gambar 6: Pembahasan Revisi Zonasi TNGGP

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pengelolaan taman nasional diperlukan adanya perencanaan yang matang yang bersumber dari data informasi kawasan konservasi (TNGGP). Pada tahun pertama periode Renstra 2020 -2024, Balai Besar TNGGP menargetkan simpul data keanekaragaman hayati yang dikembangkan sebanyak 1 dokumen, dan berhasil mencapai target sebanyak 1 dokumen revisi zonasi dan 1 dokumen penyusunan desain tapak yaitu dalam bentuk

kegiatan:

1. Revisi Zonasi TNGGP (Review)
2. Pemantapan fungsi KK melalui Penyusunan desain tapak
3. Pemantauan fungsi KK melalui fasilitasi konsultasi dan koordinasi keteknisan
4. Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
5. Evaluasi Perjanjian Kerjasama
6. Penanganan Covid-19

Dengan demikian capaian **Kinerja Kegiatan Indikator ke-2** ini mencapai **150,00%** tergolong dalam kategori **Memuaskan**.

Untuk mencapai target IKK ke-2 ini, Balai Besar TNGGP menggunakan anggaran sebesar Rp. 183.030.000,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 184.320.000,-, jadi dalam pencapaian kinerja indikator ke-2 ini terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.290.000,-, atau sekitar 0,70 %. Untuk jelasnya bisa dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Target dan Realisasi IKK Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan Balai Besar TNGGP Tahun 2020

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran		Efisiensi (%)
	Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	

Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan sebanyak 4 Dokumen	1 Dok	2 Dok (150,00)	Rp. 184.320.000,-	Rp. 183.030.000,- (99,30)	Rp. 1.290.000,- (0,70)
---	-------	-------------------	----------------------	---------------------------------	------------------------------

Untuk mewujudkan capaian IKK ke-2 ini, dilaksanakan enam kegiatan pendukung, yaitu "Revisi Zonasi TNGGP (Review)", "Pemantapan Fungsi KK melalui Penyusunan Desain Tapak", "Pemantauan fungsi KK melalui fasilitasi konsultasi dan koordinasi keteknisan", "Pemantapan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama", "Evaluasi Perjanjian Kerjasama", dan "Penanganan Covid 19". Keenam kegiatan ini berhasil dikerjakan secara baik, dengan *output* sebesar 100 %. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 13 di bawah ini.

Tabel 13. Target dan Realisasi Kegiatan Penunjang IKK Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan Balai Besar TNGGP Tahun 2020

No.	Jenis Kegiatan	Fisik			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Real.	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Real.
1.	Revisi Zonasi TNGGP (Review)	1 Keg	1 Keg	100	53.470.000	53.190.000	99,48
2.	Pemantapan fungsi KK melalui Penyusunan desain tapak	1 Keg	1 Keg	100	52.680.000	52.530.000	99,72
3.	Pemantauan fungsi KK melalui fasilitasi konsultasi dan koordinasi keteknisan	18 OT	18 OT	100	12.040.000	11.380.000	94,52
4.	Penyusunan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	1 Keg	1 Keg	100	21.881.000	21.831.000	99,77
5.	Evaluasi Perjanjian Kerjasama	1 Keg	1 Keg	100	9.949.000	9.799.000	98,49
6.	Belanja Barang Operasional dan jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3 jenis	3 jenis	100	36.700.000	36.700.000	100,00
Jumlah		6	6	100	184.320.000	183.030.000	99,30

Inventarisasi Potensi Dalam Rangka Data Informasi, diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dalam penyusunan "Revisi Zonasi TNGGP (*Review*)" dan "Pemantapan Fungsi KK melalui Penyusunan Desain Tapak". Sedangkan untuk mensinkronkan

program kerja dengan lingkungan sekitarnya, dilakukan “fasilitasi konsultasi dan koordinasi keteknisan” dengan para pihak terkait.

Kegiatan revisi zonasi TNGGP dilakukan agar kawasan TNGGP dapat dikelola secara lebih optimal dan efektif untuk kepentingan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan dengan mempertimbangkan kondisi keanekaragaman hayati di beberapa zona, kondisi sosial ekonomi dan interaksi masyarakat di sekitar kawasan, penyelesaian konflik untuk pengelolaan, pemanfaatan jasa lingkungan air, dan kegiatan pariwisata alam yang makin berkembang. Pelaksanaan revisi zonasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebelumnya dilakukan Evaluasi zona pengelolaan sesuai surat PIKA No. S.198/PIKA/PNK/KSA.0/8/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang dokumen evaluasi zona pengelolaan TNGGP terhadap perkembangan penerapan kriteria dan kegiatan zona pengelolaan sehingga optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan TNGGP sesuai Visi Misi pengelolaan TNGGP yang tertuang dalam RPJM 2019 – 2028.

Tabel 14. Hasil Review Zonasi TNGGP

No	Zona	Bidang I (± Ha)	Bidang II (± Ha)	Bidang III (± Ha)	Hasil Revisi Zona 2020
1	Zona Inti / ZI	2.205,87	5.679,20	2.575,13	10.460,20
2	Zona Rimba / ZR	1.358,94	2.541,11	2.505,66	6.402,35
3	Zona Pemanfaatan / ZP	992,25	986,9	1.560,57	3.539,72
4	Zona Tradisional / ZTr	-	147,52	328,83	476,35
5	Zona Khusus / ZKh	14,31	4,06	1,64	20,17
6	Zona Rehabilitasi / ZR	931,58	1.680,74	754,61	3.370,66
7	Zona Religi / ZRbs	-	-	1,34	1,34
	Total	100	24.270,80	100	24.270,80

Agar pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dapat dilaksanakan secara efektifitas dan efisiensi serta sesuai dengan kondisi lapangan diperlukan adanya pembagian zonasi dilanjutkan dengan penyusunan desain tapak. Oleh karena itu Balai Besar TNGGP menempatkan penyusunan dokumen perencanaan (zonasi dan turunannya), menjadi salah satu target kinerja kegiatan dalam Renstra Balai Besar TNGGP Tahun 2020 – 2024. Pada tahun pertama periode Renstra 2020 -2024, Balai Besar TNGGP menargetkan pembuatan dokumen zonasi sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan menghasilkan 1 (satu) dokumen revisi zonasi dan 1 (satu) dokumen desain tapak Lebak Ciherang.

“Survei Lapangan dan Penyusunan Desain Tapak”, diperlukan dalam rangka pengumpulan dan *updating* data dan informasi lapangan untuk bahan pertimbangan penentuan atau penetapan pemanfaatan kawasan sesuai dengan karakteristiknya. Hal ini penting agar dalam penyusunan desain tapak tidak terjadi kesalahan penetapan peruntukan ruang. Dalam penetapan peruntukan ruang akan ada kesesuaian antara kondisi dan situasi kawasan dengan kegiatan pemanfaatannya.

“Pembahasan Hasil Survey Desain Tapak”, diperlukan untuk menambah informasi atau koreksi pada data yang telah terkumpul, sehingga data dan informasi benar-benar akurat dan valid. Hal ini penting agar desain tapak dapat disusun berdasarkan pada data dan informasi yang benar, sehingga hasilnya bisa bermanfaat dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Balai Besar TNGGP sampai dengan 31 Desember 2020 sebanyak 19 PKS terdiri dari penguatan fungsi sebanyak 8 mitra, penguatan fungsi dalam rangka Kemitraan Konservasi sebanyak 10 mitra (Kelompok Tani Hutan/ KTH), dan pembangunan strategis 1 mitra.

Capaian tahun 2020 telah berhasil merealisasikan target Renstra untuk tahun 2020 sebesar **150 %** (target Renstra 1 dokumen dan realisasi 2 dokumen). Sedangkan untuk capaian dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 1 dokumen (150%). Capaian kinerja sampai tahun 2020 (2 dokumen) telah merealisasikan target Renstra sampai tahun 2020 (2 dokumen), sebesar 150 %. Sedangkan capaian target Renstra periode 2020-2024 sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 150 % (target 2 dokumen sudah terealisasi sampai tahun 2020 sebanyak 2 dokumen).

Untuk target Renstra Direktorat Jenderal KSDAE periode 2020 - 2024, jumlah simpul data keanekaragaman hayati yang dikembangkan target tahun 2020 seluas 4 dokumen, maka support kinerja Balai Besar TNGGP terhadap Renstra KSDAE sebesar 50%.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan atau pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mendapat beberapa dukungan, antara lain:

- Dukungan para pihak, baik lembaga pemerintahan (Pemda Kabupaten Cianjur, Bogor dan Sukabumi serta Propinsi Jabar) maupun swasta, yang memberikan sumbangan

pemikiran untuk penyusunan perencanaan pengelolaan kawasan konservasi/ Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

- Dukungan berupa sumbangan data dan informasi, untuk melengkapi data yang ada di Balai Besar TNGGP, dari berbagai lembaga terkait, seperti LIPI, Perguruan Tinggi (IPB, UNB, UNIKU, UNSUR, dan lain-lain), Badan Litbang, sehingga ketersediaan data dan informasi tentang kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk penyusunan perencanaan relatif sudah banyak tersedia.
- Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Balai Besar TNGGP sudah cukup baik, latar belakang pendidikan pegawai tingkat S2 cukup banyak (15 orang lulusan dalam dan luar negeri), S1 sebanyak 43 orang, dan tingkat D3 sebanyak 25 orang.

Namun demikian dalam proses penyusunan rencana pengelolaan ini, masih ditemui berbagai masalah, antara lain:

- Dinamika kehidupan dan pembangunan di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango cukup tinggi, yang kadang susah diprediksi, yang bisa menyebabkan perencanaan pengelolaan Taman Nasional harus direvisi menyesuaikan dinamika pembangunan di sekitarnya.
- Seringnya, proses pengesahan rencana pengelolaan (RPTN, Zonasi, dan Desain Tapak) masih memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga kadang-kadang menghambat kegiatan lanjutannya.
- Munculnya kebijakan atau aturan baru kadang terjadi.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka Balai Besar TNGGP telah melakukan berbagai upaya antara lain:

- Sebagai upaya untuk mengantisipasi masalah akibat dinamika pembangunan di daerah sekitarnya, pihak Balai Besar TNGGP senantiasa berkoordinasi dengan para pihak yang terkait pembangunan di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- Untuk mengawal jalannya proses pengesahan (RPTN, Zonasi, dan Desain Tapak) diintensifkan koordinasi konsultasi ke Pusat dan zonasi.

- Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan, Balai Besar TNGGP selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait dan mempercepat respons terhadap perubahan aturan supaya penyusunan perencanaan bisa selesai tepat waktu.

Dengan tersusunnya dokumen RPTN, Zonasi, dan Desain Tapak maka penyusunan Renstra dan Renja akan lebih mudah dan lebih terarah, maka proses pembangunan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango akan lebih terarah, terstruktur, terukur dan terintegrasi sehingga pencapaian tujuan pembangunan akan lebih cepat tercapai dan tepat pada sasaran yang diinginkan. Dengan demikian diharapkan tujuan pengelolaan kawasan konservasi “untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia” segera bisa tercapai.

3. Indikator Kinerja Kegiatan 3: Luas Open Area di Kawasan Konservasi yang Ditangani seluas 50 Ha (Target KSDAE 1,8 juta Ha)

Dengan adanya alih fungsi kawasan dari hutan produksi dan hutan lindung (eks Perum Perhutani) menjadi kawasan konservasi (pengelolaannya menjadi tanggung jawab Taman Nasional Gunung Gede Pangrango), maka lahan di kawasan Taman Nasional ini banyak yang mengalami degradasi. Luas lahan terdegradasi pada saat alih fungsi tahun 1999, ± 2.707,74, meskipun upaya pemulihan terus dilakukan, namun sampai tahun 2020 belum bisa seluruhnya dipulihkan. Mengingat fungsi dan manfaat kawasan konservasi ini sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia, maka keberadaan dan keutuhannya harus terus dijaga. Untuk itu Balai Besar TNGGP memprioritaskan pemulihan ekosistem terdegradasi dan memasukkannya menjadi Indikator Kinerja Kegiatan dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2020 (IKK ke-3).



Gambar 7.: Penanaman Pohon Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem di Tapos Bogor

Untuk mendukung keberhasilan upaya restorasi kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di eks kawasan Perum Perhutani (kawasan alih fungsi), pada tahun 2020 ini Balai Besar TNGGP melaksanakan pemulihan ekosistem seluas 50 ha, dari target seluas 50 ha

melalui mekanisme resotorasi (15,7 Ha) dan rehabilitasi (34,3 Ha). Jadi realisasi **IKK ke-3** (Luas Kawasan Konservasi Terdegradasi yang Dipulihkan Kondisi Ekosistemnya Seluas 50 ha) mencapai angka **100,00 %**, atau masuk kategori **Memuaskan**.

Untuk merealisasikan target capaian IKK ke-3 ini, Balai Besar TNGGP menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.738.122.754,- dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.739.966.000,-. Jadi dalam hal penggunaan anggaran terjadi efisiensi keuangan sebesar Rp. 1.843.246,- atau sebesar 0,11%. Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja IKK ke-3 ini dapat dilihat pada Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15. Target dan Realisasi IKK Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani Balai Besar TNGGP Tahun 2020

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran		Efisiensi (%)
	Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	
Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani Seluas 1,8 juta Ha	50 ha	50 ha (100,00)	Rp. 1.739.966.000,-	Rp. 1.738.122.754,- (99,89)	Rp. 1.843.246,- (0,11)

Berdasarkan data hasil kajian pemulihan ekosistem TNGGP 2015 bahwa areal terdegradasi yang harus dipulihkan di zona rehabilitasi meliputi 801,19 ha areal rusak berat, 2.496,43 ha areal rusak sedang dan 543,21 ha areal rusak ringan. Namun demikian, kesiapan pemulihan bukan hanya ditentukan oleh faktor biofisik tetapi juga faktor sosial-ekonomi-budaya masyarakat serta dukungan pendanaan, oleh sebab itu prioritas pemulihan ditempatkan pada kawasan yang *'clear and clean'*.

Sehubungan dengan hal di atas Balai Besar TNGGP merencanakan akan melakukan pemulihan ekosistem pada kurun waktu 5 tahun tersebut dengan total luas 604,40 ha, dengan rincian; areal rusak berat seluas 48,806 ha, areal rusak sedang seluas 275,175 ha dan areal rusak ringan seluas 280,439 ha. Realisasi dan target IKK ke-3 ini dapat dilihat pada Tabel 16 di bawah ini.

Tabel 16. Target dan Realisasi Kegiatan Pendukung IKK Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani Balai Besar TNGGP Tahun 2020

No.	Jenis Kegiatan	Fisik			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Real.	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Real.
1.	Penyusunan RPE 2020-2024 dan RKT PE 2020	1 Dok	1 Dok	100	50.000.000	50.000.000	100,00
2.	Survey Pendahuluan (50 Ha)	2 paket	2 paket	100	178.750.000	178.750.000	100,00
3.	Pembibitan Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem	3 paket	3 paket	100	112.495.000	112.495.000	100,00
4.	Penanaman (Pemulihan Ekosistem)	3 paket	3 paket	100	326.445.000	326.445.00	100,00
5.	Pemantauan dan Penilaian Keberhasilan Penanaman	1 paket	1 paket	100	96.596.000	96.596.000	100,00
6.	Pemulihan ekosistem dengan mekanisme alam (Patroli)	1 Keg	1 Keg	100	249.040.000	249.040.000	100,00
7.	Pengendalian Jenis Invasif/ Eksotik berupa pohon (pengendalian secara manual)	2 paket	2 paket	100	52.140.000	52.140.000	100,00
8.	Transfer Knowledge Pengelolaan Kawasan Konservasi	1 Keg	1 Keg	100	81.555.000	81.244.000	99,62
9.	Pengadaan Pendukung Kegiatan PE	6 unit	6 unit	100	374.500.000	373.600.000	99,76
10.	Penanganan Covid-19	2 jenis	2 jenis	100	3.480.000	3.340.000	95,98
11.	Pembuatan Papan Informasi Kawasan Cagar Biosfer Pada 3 Kabupaten (Cianjur, Sukabumi dan Bogor)	30 Unit	30 Unit	100	57.620.000	57.590.000	99,95
12.	Fasilitasi Kesekretariatan Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Cagar Biosfer Cibodas	1 Keg	1 Keg	100	157.345.000	156.882.754	99,71
Jumlah		12	12	100	1.739.966.000	1.738.122.754	99,89

Berdasarkan hasil kajian pemulihan ekosistem di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang mengacu kepada Permenhut Nomor: P.48/Menhut-II/2014, jenis kegiatan pemulihan ekosistem akan disesuaikan dan dikelompokkan berdasarkan kepada tipe kerusakan, kriteria kerusakan dan tindakan upaya pemulihan ekosistem.

Kerusakan ekosistem di kawasan TNGGP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu; a) ekosistem yang mengalami kerusakan ringan atau terdegradasi, b) ekosistem yang mengalami kerusakan sedang atau terganggu, dan c) ekosistem yang mengalami kerusakan berat atau terdestruksi. Tipe-tipe Kerusakan-kerusakan kawasan konservasi diatas akan sejalan dengan upaya pemulihan ekosistemnya yang dibagi menjadi 3 (tiga) teknik yaitu; 1) mekanisme alam/suksesi alam, 2) rehabilitasi dan 3) restorasi. Dukungan yang bersifat administrasi dalam rangka pemulihan ekosistem sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan dan untuk memantau keberhasilan program pemulihan ekosistem. Peningkatan diperlukan dalam rangka pemantau dinamika kegiatan pemulihan ekosistem dan kegiatan lainnya, sehingga memudahkan evaluasi dan perbaikan kelemahan yang ada. Audit sertifikasi ISO 1400:2015 pendukung pemulihan ekosistem, audit internal dalam rangka sertifikasi ISO 1400:2015 sangat bermanfaat dalam peningkatan mutu kegiatan pemulihan ekosistem sehingga kegiatan akan berjalan dengan lebih baik dan akan terpantau sesuai dengan standar ISO. Untuk kelancaran kegiatan pemulihan ekosistem diperlukan juga kegiatan lain seperti fasilitasi kegiatan pengawetan pemanfaatan dan pelayanan.

Dengan terlaksananya pemulihan lahan ekosistem seluas 50 Ha pada tahun 2020, maka capaian target Renstra Balai Besar TNGGP Tahun 2020 sampai 2024, pada tahun 2020 (target tahun 2020 seluas 22.000 ha), capaian targetnya sekitar 0,23%, demikian pula capaian target Renstra sampai tahun pertama (target 22.000 ha) ini sekitar 0,23%. Namun dilihat dari Rencana Pemulihan Ekosistem 2020-2024 capaian target sebesar 97,27% dari target 51,401 Ha. Sedangkan sumbangan pada target Restra Ditjen KSDAE (1,8 juta ha) tahun 2020 sebesar 0,03%, demikian sumbangan sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,03%.

Pencapaian target pemulihan ekosistem ini tidak lepas dari dukungan pada para pihak yang cukup tinggi, antara lain:

- Kepedulian masyarakat sekitar kawasan TNGGP sudah mulai tumbuh, yang berdampak pada naiknya animo masyarakat, untuk ikut berkiprah dalam upaya pemulihan ekosistem yang terdegradasi di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- Kiprah masyarakat, disamping penanaman dan pemeliharaan melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), juga tersedia peluang untuk ikut program adopsi pohon yang melibatkan adopter (penyandang dana), operator (organisasi pelaksana), regulator (Balai Besar TNGGP) dan masyarakat sebagai aktor (tenaga kerja).
- Dukungan lain datang dari berbagai kelompok LSM yang bergerak dalam bidang konservasi, banyak membantu kegiatan pemulihan ekosistem, baik penanaman, pemeliharaan maupun penyuluhan.
- Banyak pula tokoh masyarakat yang berperan sebagai motivator untuk para petani agar keluar dari hutan dan membuat persermaan pepohonan, baik untuk dijual sebagai tanaman hias maupun untuk bibit pemulihan ekosistem.

Namun sampai saat ini masih ditemukan berbagai kendala dalam kegiatan pemulihan ekosistem ini antara lain:

- Interaksi antara masyarakat dengan hutan relatif tinggi, sehubungan dengan padatnya pemukiman di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dalam kondisi sosial ekonomi yang masih rendah.
- Lapangan kerja (mata pencaharian) yang terbatas, dengan angkatan kerja yang tinggi menyebabkan masyarakat susah untuk bisa hidup layak, bahkan terjadi ketergantungan pada hutan.
- Adanya invasi oleh orang kota untuk mengambil alih lahan pertanian dari petani lokal menjadi milik orang kota untuk pembangunan villa, sehingga para petani kehilangan faktor utama usahatani.
- Masih jarang masyarakat yang tertarik untuk membuat pembibitan pohon jenis lokal, sehingga ketersediaan bibit jenis asli, lokal dan pionir relatif sangat terbatas.

- Anggaran untuk kegiatan restorasi masih sangat terbatas, sehingga menyebabkan kegiatan kurang optimal yang berakibat pada hasil yang tidak maksimal.

Oleh karena itu Balai Besar TNGGP telah melakukan upaya-upaya penanggulangan, yang telah dilakukan selama ini antara lain:

- Penyuluhan tentang pentingnya upaya konservasi dan akibat rusaknya lingkungan hidup pada masyarakat pedesaan, diintensifkan, terutama bagi mereka yang berdekatan dengan kawasan hutan.
- Untuk generasi muda diberikan pendidikan konservasi agar mereka bisa hidup selaras dengan alam, dan pada saat dewasa mereka bisa mengkaitkan kegiatannya dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Memotivasi dan melakukan pembinaan pada masyarakat untuk membuat persemaian bibit pohon lokal dan asli Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di desa-desa penyangga.
- Meningkatkan kerjasama dengan para pihak dalam penyelenggaraan pemulihan ekosistem, termasuk di dalamnya program adopsi pohon dan sejenisnya.
- Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan dengan adanya pemberian alternatif pekerjaan dari program pemberdayaan masyarakat tingkat ketergantungan pada kawasan hutan menurun.

Pemulihan ekosistem dilakukan secara lebih intensif sejak tahun 2004, saat munculnya Gerakan Nasional Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHHL). Saat ini keberhasilannya sudah mulai terlihat, beberapa kawasan yang telah dipulihkan mulai menghiijau, tinggi pohon ada yang sudah mencapai 10 m dengan diameter 15-20 cm (memasuki fase tiang), bahkan ada yang sudah memasuki pase veteran (pohon dengan diameter 30 cm ke atas). Hal ini bisa dilihat hampir di setiap resort terutama di Resort PTN Nagrak, Pasir Hantap, Cimande dan Sarongge.

Melihat hasil Citra Landsat TM 7, keberhasilan secara global cukup menggembirakan. Secara umum, dari klasifikasi Citra Landsat TM 7 itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tutupan lahan untuk hutan primer dan sekunder relatif stabil. Lahan bersemak belukar jumlahnya terus

meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi makin baik dan areal terbuka terus berkurang.

Dari hasil evaluasi tutupan lahan yang dilakukan tahun 2015 dan 2016 menunjukkan persen tumbuh cukup baik, lapisan tajuk sudah berkembang menjadi tiga strata, persen tutupan tajuk sekitar 25%. Bertambah baiknya tutupan lahan ini mendukung pemulihan fungsi areal, sehingga dapat menjamin keberadaan keanekaragaman hayati termasuk populasi spesies terancam punah di Balai Besar TNGGP dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Disamping itu akan meningkatkan pula fungsi lainnya seperti manfaat jasa lingkungan dan wisata alam.

Satwa liar sudah mulai betah tinggal di beberapa lokasi pemulihan ekosistem, seperti di blok Bunikasih dan Nagrak Bogor, serta di Sarongge Cianjur. Di wilayah RPTN Nagrak beberapa mata air yang tadinya sudah mati, sekarang sudah mulai berair sekalipun pada musim kemarau. Masyarakat juga sudah mulai banyak yang menyatakan minatnya untuk berwisata ke daerah Nagrak, karena wilayah yang tadinya sudah terdegradasi berat, sekarang sudah rimbun ditumbuhi pepohonan.

4. Indikator Kinerja Kegiatan 4: Jumlah Desa di Sekitar Kawasan Konservasi yang Mendapatkan Kemitraan Konservasi pada Blok/ Zona Tradisional atau peningkatan Usaha Ekonomi Produktif sebanyak 1 desa (Target KSDAE 500 desa/ 50.000 Ha)

Kondisi sosial perekonomian masyarakat desa di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), pada saat ini masih relatif rendah, sehingga menyebabkan banyak terjadi interaksi negatif antara masyarakat dengan hutan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak Balai Besar TNGGP, berusaha meningkatkan sosial ekonomi masyarakat melalui pembinaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) secara tradisional (di zona tradisional) yang telah dilakukan sejak lama sebelum areal ini menjadi bagian dari kawasan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (eks hutan Perhutani). Dengan harapan ada peningkatan



Gambar 8: Aktivitas Pemanfaatan di Zona Tradisional

kondisi sosial ekonomi, sehingga tingkat gangguan masyarakat terhadap hutan bisa diminimalisir. Oleh karena pentingnya, peningkatan sosial ekonomi masyarakat dan ada peluang untuk pemanfaatan potensi alam, maka kegiatan pemanfaatan potensi alam di zona tradisional dimasukan sebagai indikator kinerja kegiatan, yaitu Indikator Kinerja Kegiatan ke-4 "Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif sebanyak 1 desa". Untuk mencapai IKK ke-4 ini, pada tahun 2020, Balai Besar TNGGP menargetkan jumlah desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif sebanyak 1 desa, dan terealisasi sebanyak 10 desa/ KTH untuk KTH yang memiliki izin akses pemanfaatan pada zona tradisional melalui kemitraan konservasi dan 6 KTH lainnya yang mendapat pendampingan rutin (**150%**), jadi capaian Indikator Kinerja Kegiatan ke-4 sekitar masuk kategori **Memuaskan**.

Capaian IKK ke-4 yang memuaskan ini, tidak lepas dari upaya pelaksanaan semua kegiatan pendukungnya yang menggunakan anggaran sebesar Rp. 202.439.500 -, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 203.510.000,-. Jadi dalam hal ini terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar sebesar Rp. 1.070.500,- atau sebesar 0,53 %. Untuk lebih jelasnya, capaian kinerja IKK ke-2 ini dapat dilihat pada Tabel 17 di bawah ini.

Tabel 17. Target dan Realisasi IKK Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Balai Besar TNGGP Tahun 2020

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran		Efisiensi Rp (%)
	Target	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi Rp (%)	
Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif sebanyak 500 desa/ 50.000 Ha	1 desa	16 desa (150)	203.510.000,-	202.439.500,- (99,47)	1.070.500,- (0,53)

Jenis kegiatan pendukung capaian IKK ke-4 yang dilakukan adalah Evaluasi kemitraan konservasi, Pendampingan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) penerima akses

pemanfaatan HHBK, Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan TNGGP, Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat, Koordinasi penyuluh kehutanan, Pengendalian/ Monitoring/ Pengawasan Pemegang Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan, dan Penanganan Covid-19. Semua kegiatan pendukung ini berhasil dilaksanakan dengan baik, dengan *output* sebesar 100%. Untuk jelasnya, target dan realisasi IKK ke-4 ini bisa dilihat pada Tabel 18

Tabel 18. Target dan Realisasi Kegiatan Penunjang IKK Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Balai Besar TNGGP Tahun 2020

No.	Jenis Kegiatan	Fisik			Anggaran		
		Target (Kali)	Real. (Kali)	% Real.	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Real.
1.	Evaluasi kemitraan konservasi	1 Keg	1 Keg	100	23.920.000	23.744.500	99,27
2.	Pendampingan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) penerima akses pemanfaatan HHBK	1 Keg	1 Keg	100	30.920.000	30.920.000	100,00
3.	Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan TNGGP	1 Keg	Keg	100	19.355.000	18.825.000	97,26
4.	Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat	1 Dok	1 Dok	100	33.800.000	33.710.000	99,73
5.	Koordinasi penyuluh kehutanan	35 OT	35 OT	100	25.900.000	25.790.000	99,58
6.	Pengendalian/ Monitoring/ Pengawasan Pemegang Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan	38 OT	38 OT	100	20.220.000	20.080.000	99,31
7.	Penanganan Covid 19	4 jenis	4 jenis	100	49.395.000	49.370.000	99,95
Jumlah		7	7	100	203.510.000	202.439.500	99,47

Dari Tabel 18 di atas terlihat ada tujuh jenis kegiatan, semua kegiatan pendukung diarahkan untuk kelancaran dan keberhasilan pengelolaan zona tradisional melalui kemitraan dengan masyarakat. Diawali dengan "Penyusunan Rencana Pemberdayaan", yang memang sangat penting dilakukan untuk bahan pertimbangan dalam pengelolaan hutan konservasi melalui kemitraan. Dengan kegiatan ini akan diketahui kesesuaian kondisi fisik, potensi, tingkat

kerawanan kawasan. Hanya areal yang sesuai saja yang dikelola melalui kemitraan bersama masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya tidak akan menimbulkan permasalahan atau kerugian bagi kedua belah pihak.

Untuk keabsahan data dan informasi tentang situasi dan kondisi kawasan yang akan dikelola melalui kemitraan ini, serta untuk menentukan kesesuaian kawasan hutan untuk dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat perlu ada cek dan recek serta penilaian. Untuk itu dilaksanakanlah pembahasan dalam rangka verifikasi kemitraan.

Agar kemitraan dengan masyarakat, dalam rangka pengelolaan zona tradisional ini bisa berjalan dengan mulus, perlu dibuat perjanjian secara tertulis. Untuk itu pada tahun 2019 Balai Besar TNGGP bersama mitranya membuat perjanjian dan penandatanganan kerjasama kerjasama kemitraan pengelolaan kawasan konservasi.

Untuk PKS yang mau berakhir perlu dievaluasi agar bisa diketahui kalikan perpanangan PKS-nya. Evaluasi ini juga merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama dan pelaksanaan pengelolaan, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian kegiatan dengan kesepakatan serta untuk mengetahui dinamika pengelolaan serta permasalahan yang ditemukan.

Pada kenyataannya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di zona pemanfaatan tradisional ini, telah berjalan sejak kawasan ini menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, bahkan sejak kawasan ini belum masuk jadi kawasan taman nasional. Namun baru dimasukan rencana kerjasama secara formal (dibuat dokumen PKS) mulai direncanakan tahun 2015 (Renstra 2015-2019), pelaksanaannya dimulai pada 2016, dan pada tahun 2019.

Pada tahun 2015 dan sebelumnya sudah mulai dilakukan pembinaan berupa penyiapan kelompok, penyuluhan, pengamanan dalam bentuk patroli sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya pengambilan HHBK di luar zona tradisional, atau pemanfaatan hasil hutan non HHBK yang diluar kesepakatan. Pada tahun 2016, berhasil dibuat kesepakatan (PKS) kemitraan pemanfaatan zona tradisional dengan masyarakat seluas 97,36 ha, selanjutnya pada tahun 2019 bertambah menjadi 236,03 ha.

Pada tahun 2016 sampai 2018 luas zona penyangga yang dikerjasamakan dengan masyarakat tidak berubah, jadi dalam tahun-tahun ini tidak ada penambahan atau pengurangan. Pada periode ini dilakukan persiapan dan pengkondisian bagi masyarakat yang mengajukan permohonan kerjasama. Baru pada tahun 2020, bagi kelompok yang dinilai memenuhi syarat, PKS-nya diproses, sekaligus perpanjangan PKS lama yang laik diperpanjang.

Bila dibandingkan dengan target Renstra Balai Besar TNGGP periode 2020-2024 yang sampai tahun 2020 mentargetkan 1 desa, maka capaian kinerja kegiatan sampai tahun 2020 sebesar 20%. Namun bila melihat target Renstra untuk tahun 2020 (1 desa), capaian kinerja sudah mencapai lebih 150%.

Sumbangan kinerja Balai Besar TNGGP pada target kinerja Renstra Ditjen KSDAE untuk kegiatan pengelolaan zona tradisional melalui kemitraan dengan masyarakat ini, di tahun 2020 (target seluas 500 desa), sebesar 2%. Sedangkan untuk capaian periode renstra 2020-2024 (target 2.500 desa), maka sumbangan Balai Besar TNGGP sampai tahun 2020 sebesar 0,4%.

Keberhasilan upaya pengelolaan zona tradisioanal bersama masyarakat (sebagai mitra) di kawasan TNGGP ini didukung beberapa hal seperti:

- Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, khususnya kelompok mitra pengelola zona tradisional.
- Sudah terjalin kerja sama yang baik dengan berbagai pihak yang bisa membantu kegiatan pengelolaan zona tradisional melalui kemitraan dengan kelompok masyarakat, seperti dengan pemerintah daerah (Kabupaten Bogor), perguruan tinggi (IPB, dan ITB), praktisi bidang wisata, lembaga penelitian (LIPI), dan kelompok tani masyarakat.
- Tingginya aktivitas kader konservasi dan LSM lingkungan termasuk kelompok volunteer TNGGP, yang membantu memperlancar kegiatan pengelolaan zona tradisional melalui kemitraan dengan masyarakat.
- Pasar hasil usaha cukup bagus, baik pasar untuk HHBK, maupun untuk kegiatan wisata alam.

Disamping banyak faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IKK ke-4 ini, ternyata masih banyak pula masalah yang dihadapi, diantaranya:

- Adanya kecenderungan alih kepemilikan dan alih fungsi lahan milik masyarakat lokal ke orang kota, sehingga semakin banyak petani yang kehilangan mata pencaharian.
- Jumlah penduduk yang terus naik yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, termasuk jumlah anggota keluarga kelompok masyarakat peserta pengelola zona tradisional, menyebabkan tidak imbangnya jumlah masyarakat dengan potensi yang ada.
- Pemanfaatan HHBK jenis-jenis tertentu (seperti getah/ resin damar dan pinus), dimungkinkan suatu saat bisa habis, sehingga harus dicari alternative pemanfaatan yang memungkinkan pengelolaan secara lestari.
- Penduduk dengan umur atau fase angkatan kerja melonjak, sementara sumber mata pencaharian semakin sempit, terutama karena adanya kecenderungan pengalihan kepemilikan lahan dari petani ke orang kaya dari kota, yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki lahan pertanian, sebagai mata pencaharian. Sehingga mengakibatkan beratnya tekanan pada kegiatan di zona tradisional.
- Sifat gotong royong di masyarakat perdesaan sudah mulai berkecenderungan luntur, hal ini akan mengakibatkan kurang kompaknya usaha kelompok tani, yang biasanya menyebabkan anggota kurang peduli dengan usaha bersama dalam kelompok.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut di atas, sampai saat ini Balai Besar TNGGP telah melakukan berbagai upaya antara lain:

- Melakukan upaya pembinaan masyarakat agar secara bertahap, pemanfaatan HHBK (yang bersifat ekstraktif) pindah pada usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam, agar usaha pemanfaatan bisa berkesinambungan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
- Mengintensifkan jalinan kerjasama dengan para pihak agar pelaksanaan program pengelolaan zona tradisional bisa berjalan dengan lebih efektif dan efisien.
- Pemilihan jenis usaha diupayakan pemilihan jenis usaha pedesaan yang tidak berbasis lahan serta bisa menciptakan sistem ketergantungan positif antara masyarakat dengan hutan, misalnya pengembangan usaha perikanan yang sangat ketergantungan dengan hutan sebagai pengatur suplai air, ternak lebah madu yang akan mengakibatkan

masyarakat keterangtungan pada keutuhan hutan untuk mendapatkan bunga-bunga an penghasil nektar di hutan, pengembangan jasa wisata, mini hidro, dan lain-lain.

- Menggalakkan penyuluhan dan pendidikan konservasi lingkungan bagi masyarakat desa pada umumnya, dan pada khususnya pada anggota kelompok peserta program pengelolaan zona tradisional.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk kegiatan pengelolaan zona tradisional bersama mitra dari masyarakat.

Sampai saat ini sudah terbentuk kelompok masyarakat sebagai mitra Balai Besar TNGGP dalam pengelolaan zona tradisional sebanyak 10 kelompok tani hutan (KTH), lima kelompok berada di areal kerja Bidang PTN Wilayah II sukabumi, yaitu KTH Konservasi Kuta Lestari di Resort PTN Nagrak, KTH Konservasi Harapan Maju di Resort PTN Nagrak, KTH Tnas Harapan di Resort Nagrak, KTH Karya Tani di Resort PTN Pasir Hantap, KTH Mandiri Cikawung di Resort PTN Nagrak. Sepuluh KTH lainnya berada di areal kerja Bidang Wilayah III Bogor, yaitu KTH Konservasi Lengkong di Resort PTN Bodogol, KTH Putra Gunung Gede di Resort RPTN Bodogol, KTH Lembah Jari di Resort PTN Tapos, KTH Wangunjaya di Resort PTN Bodogol, dan kelompok baru yaitu KTH Jagaraksa di Resort PTN Bodogol.

Pada tahun 2019 telah terlihat hasil program pengelolaan zona tradisional untuk wilayah Sukabumi (beroperasi sejak bulan Juli 2019): KTH Mandiri Cikawung Sukabumi Rp.16.861.300,- per bulan, KTH Kuta Lestari Rp. 54.040.800,- per bulan, KTH Tunas Harapan Rp. 4.176.800,-per bulan; KTH Karya Tani Rp. 18.147.000,- per bulan; KTH Harapan Maju Rp. 44.390.000,- per bulan. Untuk wilayah Bogor (beroperasi sejak bulan Desember 2019) : KTH Wangun Jaya Rp. 4.491.000,- per bulan; KTH Konservasi Lengkong Rp 5.796.000 per bulan (getah pinus Rp 9.000/ kg); KTH Putra Gn Gede Pangrango Rp 23.970.000, per bulan.

Mudah-mudahan dengan tambahan pendapatan seperti ini mereka bisa menabung untuk mengumpulkan modal agar bisa usaha dengan lebih baik lagi, tidak tergantung pada hutan. Atau mengalihkan kegiatan yang bersifat ekstraktif ke usaha pemanfaatan jasa lingkungan seperti wisata alam.

Meskipun tambahan penghasilan tidak terlalu besar, namun tingkat kesadaran dan kepedulian simpati masyarakat terhadap upaya konservasi sumber daya alam, khususnya dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sudah semakin tinggi. Hal ini terbukti dengan berhentinya penggarapan lahan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, bahkan sebagian dari mereka berhasil mengajak penggarap lainnya untuk menghentikan penggarapan lahan hutan. Ada pula yang berperan sebagai penyuluh kepada sesama warga masyarakat. Dengan demikian terciptalah sistem antara masyarakat dengan hutan yang bersinergis, hutan mensejahterakan masyarakat, sehingga masyarakat merasa perlu untuk menjaga dan melestarikan hutan.

5. Indikator Kinerja Kegiatan ke-5: Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya Sebanyak 1 Kawasan



Gambar 9: Patroli di Tingkat Resort Seksi PTN Wilayah V Bodogol

Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi harus tertuang dalam rencana pengelolaan dari mulai Rencana Strategis 2020 – 2024, Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJPN) atau Rencana Kerja Tahunan. Penyusunan rencana pengelolaan ini harus berdasarkan pada data aktual kondisi lapangan.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana pengelolaan perlu diperhatikan. Tahun 2020 Balai Besar TNGGP melakukan kegiatan peningkatan SDM diantaranya: peningkatan kapasitas pegawai (44 orang), *transfer knowledge* pengelolaan kawasan konservasi (48 orang), Bimtek perlindungan dan Bimtek covillage (90 orang), serta peningkatan kapasitas SDM Polhut (43 orang).

Termasuk juga di dalamnya kegiatan perlindungan kawasan konservasi. Apabila gangguan dan tekanan terhadap kawasan konservasi nasional tidak segera diatasi akan berakibat fatal. Dengan rusak satu saja dari mata rantai ekosistem dalam kawasan konservasi akan berakibat pada kerusakan sistem yang terjadi di kawasan yang bersangkutan. Padahal kawasan konservasi mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat vital bagi kelangsungan dan kesejahteraan umat manusia, baik sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan,

pengawetan sumber plasma nutfah, maupun pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan demikian penurunan gangguan dan tekanan pada kawasan hutan merupakan satu dari beberapa syarat mutlak dalam pengelolaan taman nasional. Mengingat hal tersebut, maka pada tahun 2020, Balai Besar TNGGP memasukan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan sebagai salah satu kegiatan prioritas untuk mendukung pada Indikator Kinerja Kegiatan ke-5, "Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sebanyak 1 kawasan konservasi".

Untuk merealisasikan capaian IKK Ke-5 ini Balai Besar TNGGP telah menyelesaikan semua kegiatan yang direncanakan yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) jenis kegiatan atau 100% dari yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Besar TNGGP pada Dirjen KSDAE. Hasilnya cukup baik, pada tahun 2020 tidak ditemukan kasus pelanggaran yang berarti, hanya tercatat beberapa pelanggaran pada tahun 2020 seperti: perburuan sebanyak 9 kasus; penggarapan lahan seluas 532,36 Ha (1.675 KK); pengambilan HHBK sebanyak 63 batang bambu, 12 tumbuhan hias, 40 kg kulit kayu manis; pengambilan kayu bakar sebanyak 16 ikat; pendaki ilegal sebanyak 174 orang; dan penangkapan ikan tanpa izin sebanyak 15 orang. Jadi dalam hal dukungan perlindungan hutan telah berhasil mendukung satu dari satu kawasan konservasi (sesuai target). Oleh karena itu capaian **Indikator Kinerja Kegiatan ke-5** ini adalah **100,00%** termasuk kategori **Memuaskan**.

Untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan pendukung IKK ke-5 ini digunakan anggaran sebesar Rp. 1.109.869.536,- dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.116.575.000,-. Dari segi pendanaan, BBTNGGP telah berhasil mengefisienkan penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.705.464,- atau sekitar 0,60 %. Untuk jelasnya bisa dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Target dan Realisasi IKK Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya Balai Besar TNGGP Tahun 2020

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran		Efisiensi Rp (%)
	Target	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi Rp (%)	
Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sebanyak 1 kawasan konservasi	1 kawasan konservasi	1 kawasan konservasi (100,00)	1.116.575.000,-	1.109.869.536,- (99,40)	6.705.464,- (0,60)

Dalam upaya pencapaian target IKK ke-5 ini, Balai Besar TNGGP telah melaksanakan 29 (dua puluh sembilan) jenis kegiatan. Semua kegiatan yang direncanakan berhasil dituntaskan dengan output sebesar **100%**. Untuk rincinya, penggunaan anggaran per kegiatan bisa dilihat pada Tabel 20 di bawah ini.

Tabel 20. Target dan Realisasi Kegiatan Penunjang IKK Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya Balai Besar TNGGP Tahun 2020

No.	Jenis Kegiatan	Fisik			Anggaran		
		Target (Kali)	Real. (Kali)	% Real.	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Real.
1.	Penyusunan Dokumen RPJPn	1 Dok	1 Dok	100	3.200.000	3.200.000	100,00
2.	Peningkatan Kapasitas Pegawai TN Gunung Gede Pangrango	1 Keg	1 Keg	100	72.260.000	72.037.000	99,69
3.	Visitasi Learning Organization terkait pengelolaan Desa Wisata/Eco-Village dalam rangka Peningkatan Kapasitas PEH TNGGP	1 Keg	1 Keg	100	35.000.000	35.000.000	100,00
4.	Optimalisasi koordinasi pengamanan gangguan kawasan melalui Penyelenggaraan Kegiatan SPIP	1 Keg	1 Keg	100	22.870.000	22.120.000	96,72
5.	Mitigasi penanganan konflik	3 Keg	3 Keg	100	24.960.000	24.960.000	100,00

No.	Jenis Kegiatan	Fisik			Anggaran		
		Target (Kali)	Real. (Kali)	% Real.	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Real.
	satwa liar di daerah penyangga						
6.	Penanganan Covid-19	3 jenis	3 jenis	100	74.990.000	74.990.000	100,00
7.	Patroli Tingkat Balai	60 OH	60 OH	100	22.100.000	22.100.000	100,00
8.	Pengurusan Administrasi KTA Polhut	1 Keg	1 Keg	100	1.800.000	1.800.000	100,00
9.	Penanganan Konflik Satwa Dengan Manusia Di Sekitar Kawasan	9 OH	9 OH	100	4.940.000	4.640.000	100,00
10.	Koordinasi dalam rangka pengendalian gangguan kawasan konservasi	243 OT	243 OT	100	81.920.000	81.435.400	99,41
11.	Pengurusan Administrasi Pemegang Senjata Api	1 Keg	1 Keg	100	45.540.000	45.540.000	100,00
12.	Pengurusan Administrasi Senjata Api	1 Keg	1 Keg	100	20.100.000	19.350.000	96,27
13.	Fasilitasi koordinasi/konsultasi satgas POLHUT lingkup TNGGP	29 OT	29 OT	100	20.820.000	20.740.000	99,62
14.	Smart Patrol terkait Pengamanan Jalur Pendakian dan Wisata Alam	1 Keg	1 Keg	100	22.685.000	22.685.000	100,00
15.	Patroli Penanganan/Supervisi Tindak Lanjut Informasi Terhadap Pelaporan Masyarakat/Gangguan Kawasan	48 OH	48 OH	100	17.580.000	17.580.000	100,00
16.	Inhouse Training Smart Patrol dengan melibatkan Masyarakat Mitra Polhut lingkup TNGGP	3 Keg	3 Keg	100	24.320.000	24.320.000	100,00
17.	Smart Patrol terkait Pengecekan Jalur Pendakian Selabintana	1 Keg	1 Keg	100	3.150.000	3.150.000	100,00

No.	Jenis Kegiatan	Fisik			Anggaran		
		Target (Kali)	Real. (Kali)	% Real.	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Real.
18.	Smart Patrol bersama Masyarakat Mitra POLHUT	9 Keg	9 Keg	100	61.530.000	61.530.000	100,00
19.	Pengumpulan bahan dan keterangan intelijen	1 Keg	1 Keg	100	6.060.000	6.060.000	100,00
20.	Verlap, Pemutakhiran data perambahan di kawasan TNGGP	3 Keg	3 Keg	100	19.470.000	19.470.000	100,00
21.	Koordinasi/konsultasi terkait perlindungan Kawasan Konservasi	354 OT	354 OT	100	237.520.000	233.571.136	98,34
22.	Survei Kepuasan Pengunjung Terhadap Pengelolaan Kawasan TNGGP	1 Keg	1 Keg	100	3.760.000	3.760.000	100,00
23.	Biaya Rapat/Pertemuan PTN Wilayah dengan instansi terkait/mitra/masyarakat	60 Kali	60 Kali	100	27.000.000	27.000.000	100,00
24.	Smart Patrol Jalur Batas Kawasan tingkat Resort	15 Resort	15 Resort	100	78.000.000	77.992.000	99,99
25.	Peningkatan Kapasitas SDM Polhut lingkup TNGGP	1 Keg	1 Keg	100	38.100.000	38.089.000	99,97
26.	Evakuasi Kecelakaan Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian lingkup TNGGP	15 OH	15 OH	100	5.680.000	5.680.000	100
27.	Antisipasi pengamanan pengunjung wisata alam dan pendakian bersama instansi terkait lingkup TNGGP	3 Bidang Wilayah	3 Bidang Wilayah	100	8.100.000	7.950.000	98,15

No.	Jenis Kegiatan	Fisik			Anggaran		
		Target (Kali)	Real. (Kali)	% Real.	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Real.
28.	<i>Smart Patrol</i> Pencegahan Kebakaran Hutan/ <i>Illegal Logging</i> /Kerusakan Kehati tingkat Bidang Wilayah	3 Bidang Wilayah	3 Bidang Wilayah	100	21.510.000	21.510.000	100
29.	Rapat Koordinasi terkait pengamanan kawasan lingkup Internal BBTNGGP	6 Bulan	6 Bulan	100	74.910.000	74.910.000	100
30.	Manajemen gangguan kawasan melalui pengelolaan Sampah Pengunjung Wisata Alam dan Pendakian	4 Lokasi	4 Lokasi	100	36.700.000	36.700.000	100
Jumlah		30	30	100	1.116.575.000	1.109.869.536	99,40

Pada upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan dilakukan mulai dari penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPh), peningkatan kapasitas SDM, dan lebih banyak berupa kegiatan pengamanan kawasan perlindungan dan pengamanan kawasan Tanam Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2020, lebih banyak berupa patroli, baik patroli kemanan hutan, patroli bersama masyarakat, patroli jalur wisata, patroli cek jalur batas, patroli tindak lanjut informasi, maupun patroli pencegahan kebakaran hutan (Tabel 19). Semua jenis patroli ini pada dasarnya merupakan mengontrol, mencegah terjadi kerusakan hutan. Dengan kegiatan patroli ini, kawasan terkontrol, penyuluhan bisa berjalan saat ada pelanggar yang tertangkap atau saat masuk diperkampungan, dan masyarakat tahu bahwa kawasan hutan selalu dijaga (*show of force*). Dengan demikian diharapkan tingkat keamanan kawasan hutan bisa terjaga dengan lebih baik.

Berhubung dengan jumlah petugas (Polhut) yang sangat terbatas, sedangkan kawasan yang harus dijaga dan diamankan cukup luas, maka untuk pengamanan kawasan konservasi, tidak bisa dikerjakan hanya oleh pihak pengelola itu sendiri, namun perlu melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian perlu dilakukan koordinasi, konsultasi dan rapat dengan instansi terkait. Tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang bersangkutan nilai efektivitas kegiatan

pasti rendah. Koordinasi dilaksanakan dengan berbagai pihak yang bersangkutan dengan upaya pengamanan hutan, termasuk pihak pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, perguruan tinggi, LSM dan lain-lain.

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pengamanan hutan, termasuk patroli, perlu dilakukan operasi intelijen. Bila operasi pengamanan didahului, dibarengi dan di-pasca-i dengan kegiatan intelijen, maka keberhasilan operasi bertpeluang akan maksimal. Informasi awal hasil intelijen bisa dimanfaatkan untuk membuat perencanaan operasi. Intelijen pada saat operasi dan pasca operasi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan evaluasi.

Sebagai suatu kesatuan organisasi, kegiatan Polhut tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan administrasi. Oleh karena itu pada tahun 2020 Balai Besar TNGGP melaksanakan urusan administrasi kepolhutan berupa pengurusan KTA, administrasi senjata api, dan peningkatan SDM.

Dalam rangka pelayanan prima pada pengunjung, tentunya Polhut harus ambil bagian, dalam hal ini Balai Besar TNGGP telah melaksanakan operasi tim SAR, evakuasi pengunjung serta patroli jalur pendakian. Dengan kegiatan semacam ini diharapkan pengunjung merasa aman, nyaman dan puas, sehingga diharapkan akan timbul rasa simpati terhadap keamanan hutan.

Dalam hal kebakaran hutan, Balai Besar TNGGP lebih mengedepankan pencegahan (berupa patroli pencegahan kebakaran hutan) dari pada penanggulangan (pemadaman). Pemadaman dilakukan bila setelah upaya pencegahan masih saja terjadi kebakaran, Polhut dan mitra kerjanya siap dan sigap memadamkan kebakaran. Dengan upaya pengendalian kebakaran hutan seperti ini maka kerugian negara akibat kebakaran hutan bisa diminimalisir.

Pengamanan dan perlindungan hutan yang diselenggarakan Balai Besar TNGGP, terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, meskipun hasilnya masih bervariasi, namun kecenderungannya berhasil menurunkan tindak pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini berarti pula telah mendukung meningkatkan efektivitas pengelolaan di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Oleh karena itu, target Renstra Balai Besar TNGGP tahun 2020-2024 telah tercapai 100%, yaitu jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sebanyak 1 kawasan konservasi.

Bila dibandingkan dengan target Renstra Ditjen KSDAE yang mentargetkan dukungan pengamanan hutan untuk 132 kawasan konservasi, maka sumbangan kinerja BBTNGGP tahun 2020 sebesar 0,76%. Angka ini tidak bisa ditingkatkan karena kawasan TNGGP hanya merupakan satu kawasan konservasi dan kewenangan kegiatannya terbatas dalam kawasan yang menjadi tanggung jawabnya (*insitu*).

Keberhasilan dalam pelaksanaan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan TNGGP cukup baik, karena banyak hal yang mendukung antara lain:

- Masyarakat sudah mulai banyak yang peduli terutama masyarakat sekitar kawasan yang merupakan bagian dari pengelolaan kawasan TNGGP, mereka tergabung dalam kelompok masyarakat mitra Polhut (MMP) di desa-desa penyangga TNGGP, kader konservasi, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.
- Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) terus dikembangkan melalui kerjasama kemitraan dengan masyarakat, demikian pula dengan pengembangan wisata alam yang terus diupayakan bermitra dengan masyarakat setempat.
- Penyuluhan dan pendidikan konservasi terus berjalan atas kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam penyadaran masyarakat agar tidak merusak hutan, sudah disajikan dalam bentuk MoU dan kegiatan sudah berjalan dengan baik.
- Telah dijalinnya kerjasama dengan lembaga penegak hukum seperti dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, bahkan sudah disajikan dalam bentuk naskah kesepakatan (MoU), sehingga proses penegakan hukum sudah berjalan cukup baik.
- Pada saat ini zona penyangga berupa perkebunan teh terhampar luas, sehingga bisa mengurangi minat masyarakat untuk masuk kawasan hutan.

Namun demikian, dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di kawasan Taman Nasional ini masih ditemukan kendala dan permasalahan, antara lain:

- Masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango umumnya mempunyai tingkat sosial-ekonomi relatif rendah menyebabkan tingkat ketergantungan

pada kawasan hutan tinggi, padahal kawasan ini dikelilingi pemukiman padat penduduk, seperti pulau ekosistem hutan di lautan penduduk.

- Proses peralihan kepemilikan lahan dari masyarakat lokal (petani) ke masyarakat kota, masih terus berjalan, menyebabkan para petani tidak memiliki lahan usahanya, sehingga ketergantungan masyarakat pada sumber daya hutan menjadi lebih tinggi.
- Proses penegakan hukum, kadang-kadang masih memerlukan waktu yang panjang, Meskipun sudah ada ikatan kerjasama engan lembaga penegak hukum, namun dalam karena memang melibatkan banyak pihak.
- Adanya peralihan kewenangan perlindungan dan pengamanan hutan Balai Besar TNGGP (Ditjen KSDAE) ke Ditjen GAKUM LHK, sehingga agak mempersulit proses penindakan pelanggaran.
- Belum seluruh instansi terkait pengaman hutan terlibat dengan intensif dalam penanganan dan pemecahan masalah di TNGGP seperti untuk mengatasi masalah perambahan, belum semua SKPD serius terlibat dalam penanganan masalah ini.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di atas, Balai Besar TNGGP telah melakukan upaya sebagai berikut:

- Mengembangkan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelompok masyarakat binaan dibantu dan dibimbing sampai mereka mampu mandiri dan mengembangkan diri.
- Disamping penyuluhan kepada masyarakat, juga terus dilakukan pendekatan kepada Pemda agar masyarakat bisa tetap memiliki faktor produksi usaha tani, terutama lahan pertanian.
- Dalam program pemberdayaan masyarakat dipilih kegiatan agar tercipta sistem ketergantungan yang bersifat positif antara masyarakat dengan hutan konservasi, masyarakat merasa butuh dan mau menjaga serta melestarikan hutan, seperti lebah madu, perikanan, dan wisata alam.

- Pengembangan kerjasama pemanfaatan taman nasional dengan masyarakat, terutama dalam pengembangan wisata alam dan pemanfaatan HHBK di zona tradisional.
- Peningkatan koordinasi dalam upaya penegakan hukum, dengan berbagai pihak terkait, termasuk pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Ditjen Gakum LHK, tokoh masyarakat, dan lain-lain.
- Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan terus diupayakan dengan berbagai pihak, seperti Pemda, MAB (*Man and Biosphere Reserve*), LSM, dan lain-lain.

Dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan untuk mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi TNGGP, baik melalui penyusunan RPJPn, peningkatan SDM pelaksana pengelola, kegiatan pengelolaan lainnya seperti: penyuluhan (*pre-emptif*), maupun melalui operasi kepolisian (*represif*), maka tingkat gangguan keamanan hutan bisa diturunkan, bahkan pada tahun 2020 ini telah banyak masyarakat yang sadar dan peduli konservasi yang terbukti dengan banyaknya bantuan tenaga volunteer dalam pelayanan dan pengamanan pengunjung, penyuluhan, bantuan pengamanan/ patrol hutan. Masyarakat juga banyak yang mau membantu pihak pengelola, mereka berperan sebagai "informan" terjadinya gangguan hutan, seperti adanya satwa eksotik masuk kawasan konservasi, adanya masyarakat sekitar yang memelihara satwa liar, terjadi ancaman kebakaran hutan (antara lain bila ada kebakaran lahan kebun di sekitar kawasan hutan), dan lain-lain.

Dari segi keanekaragaman hayati, dengan menurunnya gangguan keamanan hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sudah terlihat berdampak pada peningkatan populasi satwa liar. Pada tahun 2020, terpantau owa jawa tiga bidang wilayah (Bogor, Sukabumi dan Cianjur), surili dan lutung terpantau di wilayah Sukabumi dan Bogor. Elang jawa ditemukan di wilayah Cianjur, Sukabumi, dan Bogor. Pada dunia flora, semakin banyak ditemukan populasi tumbuhan langka seperti rafflesia.

Dampak lainnya, sebagai akibat meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi TNGGP yaitu lestari dan meningkatnya manfaat jasa lingkungan, baik sumber daya air, oksigen, jasa wisata alam, stok karbon dan jasa lainnya. Dengan kondisi yang demikian bisa meningkatkan kesehatan ekosistem dan kesejahteraan umat manusia. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya para pengusaha hortikultura dan *nursery* di sekitar kawasan TNGGP,

demikian juga hotel, penginapan dan rumah makan, serta pengunjung yang berkecenderungan terus meningkat. Suplai dan tata air yang cukup baik dan stabil juga merupakan salah satu manfaat dari kemanan hutan yang terjaga dengan baik.

6. Indikator Kinerja Kegiatan 6. Luas Kawasan Hutan yang Diinventarisasi dan Diversifikasi dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi Secara Partisipatif seluas 8 Ha (Target KSDAE 7.663.359 Ha)



Gambar 10: Elang Jawa di Blok Geger Bentang Cianjur

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian orang asing dimasa lalu, maupun penelitian selanjutnya oleh warga NKRI, potensi sumber daya alam hayati TNGGP cukup tinggi. Dari literatur yang ada dan hasil penilaian potensi serta inventarisasi tumbuhan dan satwa liar, diketahui bahwa di kawasan TNGGP terdapat species satwa dan tumbuhan yang terancam punah, antara lain owa jawa, macan tutul, elang jawa, surili, katak merah, raflesia,

kantong semar, dan kiaksara urat kuning. Diantara berbagai jenis satwa langka terancam punah, terpilih tiga jenis satwa sebagai *flag species* dan satwa prioritas, yaitu owa jawa (*Hylobates moloch*), macan tutul (*Panthera pardus*), dan elang jawa (*Spizaitus bartelsi*). Mengingat populasinya di alam cenderung menurun, maka Balai Besar TNGGP berupaya terus untuk mempertahankan dan meningkatkan populasi satwa terancam punah ini, sehingga memasukkannya menjadi salah satu indikator kinerja kegiatan, yaitu, "*Presentase Peningkatan Populasi 25 Spesies Satwa Terancam Punah (sesuai The IUCN Red List of Threatened Prioritas Species) Sebesar 10 % dari Baseline Data Tahun 2015*". Pada tahun 2020 Balai Besar TNGGP mentargetkan luas monitoring satwa satwa prioritas seluas 8 Ha dan berhasil melaksanakan monitoring 3 (tiga) satwa prioritas dengan total seluas 33,604 Ha (di dalam *site monitoring* dan luar *site monitoring*). Dengan demikian maka realisasi kegiatan **IKK ke-6** mencapai angka lebih dari **150 %**, atau masuk kategori **Memuaskan**.

Untuk merealisasikan target capaian IKK ke-6 ini, Balai Besar TNGGP menggunakan dana sebesar Rp. 582.003.000,- dari anggaran yang tersedia Rp. 582.675.000,-, dengan demikian penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja IKK ke-6 ini termasuk efisien. Dengan

anggaran yang ada, realisasi bisa melebihi target. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 21 di bawah ini.

Tabel 21. Target dan Realisasi IKK Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif Balai Besar TNGGP Tahun 2020

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran		Efisiensi (%)
	Target	Realisasi (%)	Target	Realisasi (%)	
Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 7.663.359 Ha	8 Ha	33,604 Ha (150,00 %)	Rp. 582.675.000,-	Rp. 582.003.000,- (99,88%)	Rp. 672.000,- (0,12%)

Dalam rangka peningkatan populasi satwa liar terancam punah ini, pada tahun 2020, Balai Besar TNGGP melaksanakan 11 (sebelas) paket kegiatan yaitu, Monitoring Macan Tutul, Monitoring Elang Jawa, dan Monitoring Satwa Owa Jawa Liar baik di dalam site monitoring maupun di luar site monitoring, serta kegiatan Monitoring dan Pembinaan Habitat Edelweis Alun-Alun Suryakencana dan Alun-Alun Mandalawangi, Monitoring populasi *Rafflesia roschunii* di wilayah Resort Tapos dan Cimande (Luas Site 1,15 Ha), Identifikasi *bioprospecting*, publikasi hasil-hasil kegiatan pengelolaan dalam E Buletin Edelweis. Kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, bahkan hasilnya melampaui target. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 22 di bawah ini.

Tabel 22. Target dan Realisasi Kegiatan Pendukung IKK Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif Balai Besar TNGGP Tahun 2020

No.	Jenis Kegiatan	Fisik			Anggaran		
		Target (paket)	Realisasi (paket)	% Real.	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Real.
1.	Monitoring Macan Tutul (Luas Site di Jublegan Cianjur 2.400 Ha, Luas Non Site 2.400 ha di Sukabumi dan 2.400 ha di Bogor)	3 Lokasi	3 Lokasi	100	36.385.000	36.385.000	100,00

2.	Monitoring Owa Jawa (Luas Site di Bogor 2.759 Ha, Luas Non Site 3.617 ha di Cianjur dan 4.096 ha di Sukabumi)	3 Lokasi	3 Lokasi	100	30.360.000	30.360.000	100,00
3.	Monitoring Elang Jawa (Luas Site di Situgunung 3.477 Ha, Luas Non Site di 4.725 ha di Cianjur dan 7.730 ha di Bogor)	3 Lokasi	3 Lokasi	100	36.380.000	36.380.000	100,00
4.	Operasional <i>Javan Gibbon Center</i> (JGC)	1 Tahun	1 Tahun	100	110.500.000	110.500.000	100,00
5.	FGD Identifikasi Potensi Bio-prospecting di kawasan BBTNGGP	1 Keg	1 Keg	100	24.380.000	24.380.000	100,00
6.	Identifikasi dan inventarisasi kehati untuk penyusunan peta sebaran satwa liar tingkat resort	3 Resort	Resort	100	89.560.000	89.448.000	99,87
7.	Identifikasi <i>bioprospecting</i> ke lapangan bersama masyarakat	2 Resort	2 Resort	100	62.760.000	62.220.000	99,14
8.	Monitoring dan Pembinaan Habitat Edelweis Alun-Alun Suryakencana dan Alun-Alun Mandalawangi	2 Resort	2 Resort	100	52.550.000	52.530.000	99,96
9.	Monitoring populasi <i>Rafflesia Roschunii</i> di wilayah Resort Tapos dan Cimande (Luas Site 1,15 Ha)	2 Resort	2 Resort	100	19.780.000	19.780.000	100,00
10.	Penyusunan informasi kehati dalam bentuk e-buletin Edelweis	6 Edisi	6 Edisi	100	30.720.000	30.720.000	100,00
11.	Penanganan Covid-19	5 jenis	5 jenis	100	89.300.000	89.300.000	100,00
Jumlah		11	11	100	582.675.000	562.003.000	99,88

Monitoring satwa terancam punah di Balai Besar TNGGP lebih difokuskan pada satwa bendera yaitu owa jawa (*Hylobates moloch*), macan tutul (*Panthera pardus*), dan elang jawa (*Spizaetus bartelsi*), disamping tetap memonitor jenis-jenis lainnya. Dengan kegiatan ini dapat diduga dinamika populasi jenis-jenis satwa dimaksud, sehingga bisa dijadikan masukan dalam pertimbangan kebijakan pengelolaan selanjutnya.



Gambar 11. Populasi Jenis Terancam Punah pada Setiap Site Monitoring di TNGGP

Dinamika populasi 3 (tiga) jenis satwa terancam punah yang merupakan species bendera di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, cukup berfluktuasi terutama untuk elang jawa dan owa jawa, sedangkan untuk macan tutul relatif stabil. Dengan melihat dinamika populasi satwa seperti terlihat pada tabel 22 bisa diduga bahwa ekosistem Taman Nasional Gunung Gede Pangrango cukup baik untuk mendukung kehidupan satwa liar.

Namun sejak tahun 2015, dinamika populasi tahun-tahun sebelumnya tidak bisa dibandingkan, karena ada perubahan areal pengamatan. Sebelum tahun 2015 pengamatan populasi satwa

liar ini dilakukan untuk seluruh kawasan, sedangkan sejak tahun 2015 dilakukan pada site monitor tertentu, sehubungan dengan terbitnya arahan Direktur Jenderal PHKA melalui surat No. S.685/IV-KKH/2014 tanggal 06 Oktober 2014 tentang Tindak Lanjut Rumusan Rakor KKH 2014, yang menyatakan bahwa sejak tahun 2015 kegiatan monitoring difokuskan pada *site monitoring* yang telah ditentukan, dengan demikian *base line data* yang dipakai *base line data* tahun 2015 bukan tahun 2013. Data populasi satwa Hasil monitoring *flag species* di Balai Besar TNGGP pada tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Populasi Jenis Terancam Punah di Balai Besar TNGGP Tahun 2015 - 2020

No.	Species	Site Monitoring	Populasi (ekor)								Keterangan
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	%*)	%**)	
1	Elang jawa (<i>Spizaetus bartelsi</i>)	Resort PTN Situgunung	6	7	12	6	8	10	25,00	66,67	Data populasi merupakan data di <i>site monitoring</i> masing-masing jenis
2	Owa jawa (<i>Hylobates moloch</i>)	Resort PTN Bodogol,	107	98	96	117	92	162	76,09	51,40	
3	Macan tutul (<i>Panthera pardus</i>)	Resort PTN Tegalega dan Sarongge	2	3	2	5	3	4	33,33	100,00	
Peningkatan Rata-rata (Species Bendera)									44,81	72,69	

Catatan : *) Persen penambahan dari tahun 2019 ke 2020

**) Persen penambahan dari baseline data tahun 2015

Dari Tabel 23 terlihat bahwa populasi satwa jenis satwa bendera di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango berfluktuasi, namun pada periode Renstra 2015-2020, secara global terjadi kenaikan populasi. Bila populasi pada tahun 2020 dibandingkan dengan base line data (tahun 2015) terjadi kenaikan populasi. Begitu juga populasi tahun 2020 dibandingkan dengan populasi tahun 2018, terjadi peningkatan. Data yang fluktuatif ini, belum tentu disebabkan penurunan populasi, karena banyak faktor yang berpengaruh pada dinamika populasi satwa liar. Beberapa faktor yang diteramati pada *site monitoring* satwa di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah adanya persaingan, perubahan kondisi habitat, cuaca saat pengamatan, dan adanya individu satwa yang harus mencari teritori baru.

Faktor persaingan terlihat di *site monitoring* elang jawa (Resort PTN Cimungkad), diduga karena ada persaingan dengan elang brontok, elang jawa terdesak dan pindah ke tempat lain. Pada akhir tahun 2020 diduga elang jawa pindah *home range*, jadi jarang ditemukan di *site monitoring*. Untuk itu perlu ada solusi pemecahan masalah, misalnya *site monitoringnya* dipindah. Demikian juga cuaca saat pengamatan, pada saat musim hujan jarang terlihat elang jawa beraktivitas sehingga pertemuan dengan elang jawa menurun, meskipun populasinya tidak menurun.

Perubahan habitat cukup mudah terlihat pengaruhnya pada pertemuan dengan owa jawa pada *site monitoring* di Resort PTN Bodogol. Pada saat pohon pakan sedang musim berbuah mudah ditemukan owa jawa, namun bila tidak sedang musim berbuah lebih jarang bisa ditemukan aktivitas owa jawa di site monitor. Faktor lain yang mempengaruhi perjumpaan dengan owa jawa adalah adanya individu remaja yang beranjak dewasa meninggalkan kelompok untuk mencari teritori lain.

Macan tutul yang pada tahun-tahun sebelumnya terekam dalam satu kelompok sedang mengasuh anak di *site monitoring* Resort PTN Sarongge, pada tahun 2020 anaknya sudah tidak ditemukan lagi. Hal ini diduga karena anakan yang sudah menjadi individu dewasa pindah mencari teritori baru.

Tahun 2020 monitoring jenis satwa bendera selain dilakukan pada site monitoring juga dilakukan di luar *site monitoring* sehingga dari target 8 Ha terealisasi seluas 33,604 Ha. Harapannya perluasan area monitoring dapat menggambarkan populasi dari kawasan TNGGP. Capaian IKK ke-6 Balai Besar TNGGP pada tahun 2020 mencapai 150 % dari target Penetapan Kinerja seluas 8 Ha. Namun capaian pada Renstra Balai Besar TNGGP sebesar 0,4%.

Namun bagaimanapun banyaknya kegiatan yang mengupayakan peningkatan populasi TSL, pada batas tertentu tidak akan bisa meningkatkan populasi. Dengan melihat luas kawasan TNGGP yang relatif tetap dan ekosistem yang relatif stabil, maka bila populasi sudah sesuai dengan daya dukung kawasan, peningkatan populasi TSL di kawasan ini akan sulit dilakukan. Oleh karena itu target Balai Besar TNGGP akan lebih tepat untuk menjaga dan mempertahankan stabilitas ekosistem kawasan konservasi yang dikelolanya, antara lain melalui perbaikan habitat, terutama pada lahan eks Perum Perhutani (lahan alih fungsi).

Secara umum, kondisi tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang berstatus dilindungi atau terancam punah di Indonesia berkecenderungan semakin lama, semakin mengkhawatirkan. Belum banyak jenis satwa ataupun tumbuhan yang berubah status dari langka dilindungi menjadi satwa umum atau biasa lagi, tapi malah kebanyakan malah populasinya



semakin turun, sampai punah seperti Gambar 12. Sanctuary Owa Jawa JGC Bodogol harimau bali dan harimau jawa. Oleh karena itu dalam upaya konservasi keanekaragaman jenis hayati perlu ada peningkatan kegiatan penyelamatan species satwa langka yang terancam punah, baik secara insitu maupun eksitu. Pada jenis-jenis satwa tertentu yang populasinya memang sudah sangat mengkhawatirkan perlu penanganan khusus antara lain dalam bentuk sanctuary species satwa terancam punah. Hal ini perlu dilakukan terutama dalam rangka menyelamatkan satwa yang sudah mengalami perlakuan manusia seperti binatang kesayangan (pets).

Dalam rangkaantisipasi permasalahan tersebut di atas, maka pada tahun 2015 Balai Besar TNGGP menunjuk dan menetapkan satu sanctuary species satwa terancam punah, yaitu sanctuary untuk penyelamatan jenis owa jawa (Javan Gibbon Centre) yang berlokasi di Resort PTN Bodogol Seksi PTN Wilayah V Bodogol Bidang PTN Wilayah III Bogor. Sejak tahun itulah Balai Besar TNGGP melaksanakan pengelolaan sanctuary species satwa terancam punah untuk jenis owa jawa sampai saat ini. Setiap tahunnya Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, banyak didatangi para peneliti dan peserta Diklat serta mahasiswa berpraktikum sehubungan dengan keberadaan satwa liar terancam punah termasuk jenis bendera. Pada asst ini Balai Besar TNGGP juga sedang mengembangkan wisata minat khusus dengan objek satwa liar, antara lain macan tutul melalui paket "Menghitung Parut Menduga Jumlah"; owa jawa melalui paket "Menyusur Alur Jelajah Owa" dan elang jawa dengan paket "Melihat Satwa Dirgantara Berjaya".

Sanctuary yang telah ditunjuk (dibangun) perlu dioperasikan agar pengembangbiakan satwa liar yang berstatus dilindungi dan hampir punah dapat berjalan sesuai harapan. Saat ini *Javan*

Gibbon Centre atau Yayasan Owa Jawa menampung dan merehabilitasi primata jenis owa jawa hasil sitaan atau penyerahan sukarela dari masyarakat. Dengan adanya penyelamatan dan rehabilitasi (mengembalikan pada sikap dan sifat liar) ini sangat mendukung upaya konservasi satwa liar yang sudah terancam punah. Perkembangan jumlah owa jawa di sanctuary *Javan Gibbon Centre* lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Perkembangan Jumlah Owa Jawa di *Sanctuary* JGC Tahun 2015 -2020

No	Uraian	Jumlah (ekor)	Keterangan
1.	Jumlah Awal Tahun 2015	20	Tambahan : 2 individun
	Betina	12	
	Jantan	10	
2.	Jumlah Tahun 2016	22	Pelepasan : 3 ekor
	Betina	10	
	Jantan	10	
3.	Jumlah Tahun 2017	26	Translokasi : 5 ekor Pelepasan : 3 ekor
	Betina	11	
	Jantan	15	
4.	Jumlah Tahun 2018	18	Translokasi: 5 ekor Mati: 1
	Betina	8	
	Jantan	10	
5.	Jumlah Tahun 2019	16	Pelepasan: 5 ekor Mati : 3 ekor Lahir: 2 ekor
	Betina	5	
	Jantan	11	
6.	Jumlah Tahun 2020	10	Pelepasan: 6 ekor Mati : 1 ekor Lahir:0 ekor
	Betina	8	
	Jantan	2	

Kegiatan sanctuary owa jawa di JGC sudah berjalan sejak tahun 2003. Pada tahun 2013 disepakati kerjasama antara Balai Besar TNGGP dengan Yayasan Owa Jawa melalui naskah Perjanjian Kerjasama No. 116/11-TU/2/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pelestarian Owa Jawa. Untuk kegiatan teknis lebih banyak dibantu atau dilaksanakan oleh mitra kerja, Balai Besar TNGGP melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik. Dengan adanya naskah perjanjian ini, maka mulai tahun 2015 sampai saat ini, Balai Besar TNGGP melakukan operasional sanctuary, yaitu operasional *Javan Gibbon Centre*.

Keberhasilan Balai Besar TNGGP dalam mencapai target IKK ke-6 ini didukung antara lain oleh:

- Disekitar kawasan tersedia cukup banyak pusat pendidikan dan penelitian sehingga memudahkan untuk berkonsultasi tentang metoda monitoring satwa yang bersangkutan;

- Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tidak terlalu jauh dari pusat pemukiman dan relatif lebih mudah dijangkau, sehingga pelaksanaan monitoring juga relatif lebih mudah dilakukan.
- Peralatan relatif memadai, baik peralatan lapangan seperti kamera trap dan peralatan lapangan lainnya, juga peralatan pengolahan data, seperti komputer;
- Sumber daya manusia relatif baik, disamping tenaga PEH juga banyak mendapat bantuan dari perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat;

Disamping itu masih dirasakan pula beberapa permasalahan lain seperti:

- Pada saat ini pemantauan satwa liar baru bisa dilakukan untuk tiga jenis satwa liar pada site tertentu, diduga belum cukup mewakili untuk kawasan TNGGP yang mempunyai luas 24.270,80 ha.
- Untuk meningkatkan keberhasilan, meskipun banyak mendapat bantuan dari para pihak, namun tetap diperlu adanya peningkatan skill atau keahlian SDM dalam bidang penelitian spesies terancam punah di Balai Besar TNGGP, sehingga personil PEH dapat melakukan tahapan lain, selain *monitoring* untuk pengembangan pengelolaan satwa liar di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- Sarana dan prasarana teknis survey untuk mengamati spesies tertentu yang memiliki tingkat kesulitan pengamatan yang berbeda sehingga harus ditunjang dengan peralatan khusus.
- Belum tersedianya *master plan* atau perencanaan yang matang dalam bidang Pengawetan Satwa Kunci dan *Flagship Species* TNGGP.

Sejauh ini, pihak Balai Besar TNGGP telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut antara lain:

- Sehubungan dengan penentuan *site monitoring* tertentu, maka untuk melengkapi data yang diperlukan (al. populasi satwa liar secara keseluruhan), Balai Besar TNGGP mengupayakan monitoring secara swadana di beberapa site untuk melengkapi data populasi satwa sesuai kebutuhan, melalui kerjasama dengan *Conservation International Indonesia* (CII) dan Yayasan Owa Jawa atau *Java Gibbon Centre* (JGC) untuk owa jawa dan monitoring macan tutul; untuk pengamatan elang jawa dan jenis raptor lainnya bekerjasama dengan RCS dan Suaka Elang;

- Untuk pengembangan kegiatan pengembangan monitoring satwa liar dilakukan pula melalui kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, seperti LIPI, IPB, PSS Primata IPB, ITB, dan lain-lain;
- Data dan informasi hasil Pengamatan, inventarisasi, penelitian, diupayakan dikaji oleh personil TNGGP baik oleh PEH maupun Polhut dengan sumber dana DIPA BA 029 maupun mandiri;
- Untuk meningkatkan keamanan, dilakukan patroli, baik fungsional, gabungan, intelijen di areal perluasan, dan lain-lain; keperluan saran dan prasarana penelitian satwa liar dipenuhi secara bertahap;
- Untuk pemeliharaan data dan informasi dilakukan peningkatan data base dan untuk serta penyajiannya melalui web site, selalu diupayakan updating data keanekaragaman sumber daya alam hayati dan pemetaannya;

Dengan berbagai upaya seperti tersebut di atas akan dapat diperoleh data dan informasi yang akurat dan update mengenai spesies terancam punah di kawasan TNGGP, namun untuk meningkatkan keakuratan data, untuk tahun-tahun selanjutnya disarankan penambahan *site monitoring* sehingga bisa mewakili populasi keseluruhan kawasan. Dengan demikian akan membantu dalam pengelolaan kawasan konservasi secara keseluruhan, terutama dalam hal pengelolaan satwa liar, termasuk peningkatan populasi atau paling tidak untuk mempertahankan populasi sesuai dengan daya dukung habitatnya. Dengan terpeliharanya populasi jenis satwa berarti terpeliharanya ekosistem, karena bila ekosistem rusak populasi satwa liar akan menurun.

Dengan terpeliharanya sumberdaya alam hayati dan stabilitas ekosistem akan berpengaruh positif pada kehidupan dan kesejahteraan umat manusia. Beberapa tahun terakhir tidak ditemukan atau tidak terjadi konflik satwa liar (khususnya macan tutul), padahal pada tahun-tahun silam di musim kemarau sering dilaporkan macan tutul turun ke pemukiman. Untuk lebih menjamin keberhasilan upaya peningkatan pengelolaan satwa liar ini ke depannya perlu disusun Renstra Pengawetan Satwa Kunci dan *Flagship Species* di TNGGP.

Tidak hanya jenis satwa bendera yang dimonitoring juga dilakukan pada jenis tumbuhan Edelweis di Alun-Alun Suryakencana dan Alun-Alun Mandalawangi serta *Rafflesia Roschunii* di wilayah Resort Tapos dan Cimande.

Dengan peningkatan populasi satwa dan ekosistemnya, memberikan peluang untuk dilakukan penelitian tentang pemanfaatan sumber palismanutlah (*bioprospecting*) ini secara lebih luas untuk menunjang tingkat kesejahteraan umat manusia. Seperti penelitian owa jawa untuk menanggulangi penyakit AIDS, pemanfaatan jamur untuk pengendalian serangga hama, pemanfaatan paku kebo untuk pembuatan shampo, pemanfaatan paku ekor kuda untuk bahan pembersih logam dan lain-lain. Pada saat ini telah dilakukan berbagai penelitian tentang manfaat tumbuhan dan satwa bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga Litbang. Bila saja tumbuhan satwa liar ini tidak dilindungi dan terlanjur musnah, hilanglah kesempatan orang untuk meneliti dan memanfaatkannya dengan lebih baik lagi. Untuk hal ini perlu lebih digalakkan upaya penelitian untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah secara lestari.

7. Indikator Kinerja Kegiatan 7: Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education sebanyak 1 Destinasi (Target KSDAE: 7 Destinasi)

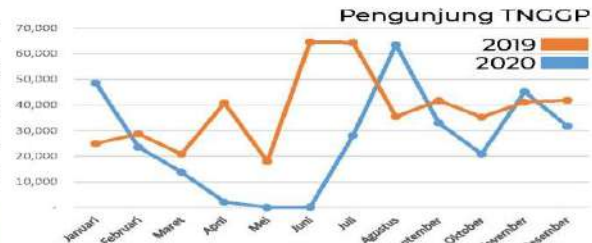
Dalam rangka pengembangan pemanfaatan kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bidang wisata alam untuk peningkatan devisa negara serta untuk memenuhi target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 3.365.475.000,-, walaupun dalam masa pandemi Covid - 19 dengan kondisi jumlah pengunjung mengalami penurunan dari tahun 2019 (-32,42%), target PNBP dapat terealisasi sebesar Rp 5.128.351.500 (152,38%).

PNBP

BALAI BESAR TAMAN NASIONAL
GUNUNG GEDE PANGRANGO



Jumlah pengunjung Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020 adalah 310.145 orang terdiri dari : 309.845 orang wisatawan lokal 300 orang mancanegara



Penurunan jumlah pengunjung dibandingkan tahun 2019

- 32,42%



Realisasi pencapaian PNBP 2020 Balai Besar TN Gede Pangrango terhadap target.

152,3%

Tahun	Target	Pencapaian	Persentase
2015	682.000.000	3.352.992.381	491.64
2016	2.040.150.265	3.855.213.447	188.97
2017	3.545.700.00	3.632.273.580	102.44
2018	2.300.000.00	6.119.918.223	266.08
2019	3.123.810.000	9.230.973.735	295.50
2020	3.365.475.000	5.128.351.500	152.38

Gambar 13. Capaian PNBP Balai Besar TNGGP Tahun 2020

Balai Besar TNGGP untuk mencapai IKK ke-7 berupaya untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana melalui pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN yaitu pembangunan Pusat Pendidikan Konservasi Elang Jawa Cimungkad di Resort Cimungkad, Seksi PTN Wilayah IV Situgunung, Bidang PTN Wilayah II Sukabumi. Selain itu dilakukan kegiatan penyusunan materi informasi potensi wisata alam, promosi wisata melalui berbagai event virtual maupun non virtual, dan kegiatan lainnya (Tabel 25). Realisasi kinerja untuk **Indikator Kinerja Kegiatan ke-7** sebesar **100 %**. Untuk jelasnya bisa dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Target dan Realisasi IKK Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary*, Balai Besar TNGGP Tahun 2020

Target IKK	Realiasi IKK (% realisasi)	Anggaran	Realiasi Anggaran (% realisasi)
1 Destinasi	1 Destinasi (100 %)	Rp. 535.400.000,-	Rp. 533.883.059,- (99,72%)
		Rp5.142.000.000,- (SBSN)	Rp. 5.138.647.000,- (99,93%)
Total		5.677.400.000,-	5.672.530.059 (99,91%)

Dari Tabel 25, terlihat bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020, untuk mendukung pencapaian target jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* menggunakan anggaran sebesar Rp. 5.672.530.059,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 5.677.400.000,-. Dalam hal ini terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.869.941,- atau 0,09 %. Dengan berbagai upaya tersebut di atas, saat ini target capaian PNPB mencapai 152,30% dan diharapkan setelah beroperasinya Pusat Pendidikan Konservasi Elang Jawa Cimungkad capaian ini terus meningkat dan segi "*science, academic, voluntary, education*" tercapai, jadi capaian **Indikator Kinerja Kegiatan ke-7** ini lebih dari sebesar **100,00 %**, masuk kategori **Memuaskan**.

Kegiatan pendukung untuk pencapaian IKK ke-7 ini, sebanyak 14 (empat belas) kegiatan dan semua kegiatan pendukung telah dilaksanakan dengan baik dan tuntas. Untuk lebih jelasnya tentang pelaksanaan kegiatan pendukung IKK ke-7 dan penggunaan anggarannya bisa dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Target dan Realisasi Kegiatan Penunjang IKK Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary*, Balai Besar TNGGP Tahun 2020

No.	Jenis Kegiatan	Fisik			Anggaran		
		Target (Paket)	Realisasi (Paket)	% Real.	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Real.
1.	Pembentukan forum wisata dalam rangka persiapan permohonan IUPJWA	1 Keg	1 Keg	100	12.950.000	12.800.000	98,84
2.	Pameran Hari Konservasi Alam Nasional	1 Keg	1 Keg	100	79.598.000	79.518.059	99,90
3.	Festival TN dan TWA	1 Keg	1 Keg	100	64.660.000	64.300.000	99,44

4.	Pembuatan Video Pendek Gede Pangrango	4 Keg	4 Keg	100	100.000.000	99.780.000	99,78
5.	School Visit	4 Keg	4 Keg	100	30.140.000	30.140.000	100,00
6.	Perpustakaan Konservasi Keliling pendukung kegiatan pendidikan lingkungan	4 Keg	4 Keg	100	10.960.000	10.960.000	100,00
7.	Pencetakan bahan informasi dan promosi wisata alam	10 Jenis	10 Jenis	100	100.000.000	100.000.000	100,00
8.	Penanganan Covid-19	4 Jenis	4 Jenis	100	24.780.000	24.780.000	100,00
9.	Audit Pengawasan (Surveyance) ISO 14001:2015	1 Keg	1 Keg	100	17.352.000	17.202.500	99,14
10.	Pembuatan Buku Informasi Wisata Alam Bidang PTN Wilayah I Cianjur	1 Keg	1 Keg	100	15.070.000	15.070.000	100,00
11.	Identifikasi Aspek Lingkungan ISO 14001 : 2015	1 Keg	1 Keg	100	21.200.000	21.160.000	99,81
12.	Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Dalam Rangka Sertifikat ISO 14001 : 2015	1 Keg	1 Keg	100	31.830.000	31.312.500	98,37
13.	Patroli Pendakian	1 Keg	1 Keg	100	26.860.000	26.860.000	100,00
14.	Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN	1 Unit	1 Unit	100	5.142.000.000	5.138.647.000	99,93
Jumlah		14	14	100	5.677.400.000	5.672.530.059	99,91

Disamping peningkatan pelayanan, pembenahan destinasi perlu terus ditingkatkan; dilakukan pembaharuan materi-materi promosi dalam bentuk video pendek, buku informasi wisata, banner, x banner, tumbler, goodybag, leaflet, flashdisk, kaos, map TNGGP, mug; mengikuti berbagai event dalam rangka promosi kawasan melalui Hari Konservasi Alam Nasional serta Festival Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.



Gambar 12. Pusat Pendidikan Konservasi
Elang Jawa Cimungkad

Demikian pula dengan pembangunan Sarpras Ekowisata Taman Nasional Model SBSN, sangat berperan dalam pencapaian IKK ke-7, dengan dibangunnya fasilitas wisata minat khusus Pusat Pendidikan Konservasi Elang Jawa Cimungkad di Resort Cimungkad dapat meningkatkan pelayanan dalam rangka meningkatkan jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education*.

Promosi wisata alam di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango perlu terus diintensifkan, terutama untuk kegiatan wisata alam minat khusus pada berbagai event Hari Konservasi Alam Nasional dan Festival TN dan TWA secara virtual karena kondisi pandemi Covid-19. Dengan adanya proyek SBSN, promosi wisata alam, dan TNGGP sudah memiliki ISO 14001 : 2015 yang merupakan standar internasional ini telah diakui sebagai kerangka pengembangan sistem manajemen lingkungan di organisasi/ perusahaan pada kegiatan wisata yang pada tahun 2020 dilakukan audit pengawasan (surveillance), identifikasi aspek lingkungan, serta pemantauan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka sertifikasi ISO 14001 : 2015. Faktor-faktor seperti ini sangat mendukung pencapaian IKK ke-7 Balai Besar TNGGP tahun 2020.

Jumlah pengunjung tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 karena kondisi pandemi Covid-19 yang merata hampir di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia serta adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai dilakukan penutupan wisata dan pendakian. Jumlah pengunjung tahun 2020 sebanyak 310.145 orang mengalami penurunan sebesar (-32,42%) dibandingkan tahun 2019 sebanyak 458.951 orang.

Bila tahun sebelumnya capaian IKK terkait wisata melihat dari pencapaian target jumlah pengunjung, untuk Perjanjian Kinerja tahun 2020 dilihat dari satuan jumlah destinasi, sehingga capaian IKK ke-7 mencapai **100%**.

Dibandingkan dengan target dari Renstra DITJEN KSDAE (yang pada tahun 2020 menargetkan Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education*

sebanyak 1 destinasi sebanyak 7 destinasi), maka sumbangan Balai Besar TNGGP mencapai 14,29 %. Begitu pun sumbangan untuk target periode 2020 – 2024 yang sampai tahun 2020 menargetkan 7 destinasi, Balai Besar TNGGP sudah menyumbang 14,29 %.

Pada masa pandemi Covid – 19, pengunjung ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango masih cukup tinggi karena dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

- Promosi yang dilakukan terus-menerus, dari tahun ke tahun, dan penggalangan kerjasama dengan mitra mitra, berupa pembuatan dan penyebaran *booklet*, *leaflet*, media publikasi elektronik, media publikasi cetak, pemasangan paster di hotel dan rumah makan, pameran dan lain-lain.
- Potensi alam yang tinggi merupakan daya tarik utama, keanekaragaman hayati, landscap dengan *view* yang indah, iklim mikro, serta potensi wisata lainnya baik dalam kawasan Taman Nasional maupun sekitarnya.
- Posisi kawasan yang strategis dekat dengan kota-kota besar di Indonesia termasuk ibu kota negara RI dan bandar udara internasional dengan aksesibilitas yang cukup baik.
- Fasilitas akomodasi tersedia cukup banyak, demikian pula untuk pelayanan perjalanan sudah banyak biro perjalanan yang profesional.

Namun demikian, dalam mewujudkan capaian IKK ke-7 ini masih ditemukan berbagai kendala, antara lain:

- Kemacetan lalu lintas menuju ke destinasi wisata TNGGP belum benar-benar nyaman di beberapa tempat masih terdapat pengerjaan jalan (pelebaran dan pembangunan rambu), menyebabkan orang agak malas berkunjung.
- Harga karcis yang semakin mahal, menyebabkan pengunjung memilih destinasi wisata dengan harga yang lebih murah.
- Adanya pungutan karcis yang lebih dari satu kali untuk satu destinasi, seperti karcis masuk dari Pemda dan karcis masuk Taman Nasional, banyak membuat pengunjung bingung dan kurang percaya akan keabsahannya.

- Masih banyak masyarakat sekitar destinasi wisata kurang ramah terhadap pengunjung serta kurang bisa menjaga kebersihan lingkungan.
- Pengetahuan dan wawasan personil tentang tatacara melayani tamu dan kemampuan berbahasa asing masih rendah, sehingga pelayanan pengunjung belum professional, baik tata cara penerimaan tamu, terlebih masalah bahasa.
- Promosi lewat pameran masih terbatas dilakukan di dalam negeri.
- Perawatan fasilitas wisata alam dalam kawasan Taman Nasional masih kurang baik, sehingga kurang bisa difungsikan dan kadang menyebabkan kesan kumuh.
- Secara umum perilaku pengunjung domestik (pengunjung dominan) masih kurang ramah lingkungan, sering buang sampah sembarangan, sehingga kawasan kadang terkesan kotor dan tamu asing merasa tidak nyaman dengan kehadiran sampah.
- Masih ditemukan pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan kondisi new normal.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Balai Besar TNGGP telah melakukan berbagai upaya, diantaranya melalui:

- Mengupayakan peningkatan profesionalisme pelayanan tamu, direncanakan kegiatan Diklat dan magang bagi para petugas pelayan tamu di destinasi wisata yang telah rofessional, serta direncanakan akan melanjutkan kursus bahasa asing bagi personil penerima tamu, terutama kursus Bahasa Inggris.
- Meningkatkan pelayanan kepada pengunjung sehubungan dengan kenaikan harga karcis, seperti pembuatan papan-papan informasi, kebersihan, dan pelayanan informasi.
- Merehabilitasi fasilitas wisata alam yang sudah rusak, dan pemeliharaan secara berkala.
- Menginformasikan waktu-waktu kunjungan yang lebih nyaman, terbebas dari kemacetan lalu lintas kepada wisatawan asing yang mau datang ke kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

- Mengusulkan pengkarcisan (*ticketing*) satu atap untuk destinasi wisata di Cibodas, antara Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Cianjur, Balai Kebun Raya Cibodas, dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.
- Melaksanakan pameran secara virtual.
- Melakukan operasi sampah secara rutin tiap bulan oleh petugas TNGGP dan volunteer serta pemberian penyuluhan kepada pengunjung sebelum melakukan pendakian untuk mengurangi jumlah sampah di dalam kawasan.
- Meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan new normal bagi petugas pelayanan maupun pengunjung.

Dengan upaya-upaya seperti tersebut di atas, maka jumlah pengunjung ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango relative tinggi walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, serta diharapkan pada tahun mendatang akan terjadi peningkatan kunjungan terutama wisatawan mancanegara ke kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dengan banyaknya kunjungan wisatawan mancanegara ini berdampak pada penambahan devisa negara dan menambah mata pencaharian serta pendapatan masyarakat. Hal ini telah terbukti dengan terpenuhinya target pendapatan negara bukan pajak (PNBP), meskipun targetnya terus semakin tinggi.

Masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional mendapatkan mata pencaharian dari sektor wisata, antara lain bisa berjualan makanan, minuman, cinderamata, dan jasa wisata (terutama di area wisata Situgunung). Jasa wisata yang sudah berjalan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan sekitarnya antara lain, jasa angkutan, jasa pemanduan, jasa dan akomodasi. Pada tahun 2020, di kompleks wisata Situgunung, terlihat ada penambahan kunjungan yang menyebabkan penambahan para penjual jasa (terutama pedagang makanan, minuman dan cinderamata) secara signifikan dengan estimasi pendapatan untuk seluruh pelaku usaha. Hasil perhitungan tahun 2019, pendapatan dari keberadaan wisata di Situgunung sekitar Rp 30.287.400.00,- per tahun (total penghasilan pelaku usaha khusus area Situgunung sebesar Rp 21.033.000.000,- per tahun dan pendapatan dari villa/ penginapan sebesar Rp 9.254.000,- per tahun). Namun untuk tahun 2020 kondisi pandemi Covid-19 mengalami penurunan karena beberapa bulan dilakukan penutupan wisata dan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Semoga kondisi pandemi Covid – 19 ini akan segera berakhir agar dapat memperbaiki kembali kondisi wisata dan perekonomian masyarakat sekitar. Sedangkan penambahan mata pencaharian dan pendapatan masyarakat diharapkan tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat pada upaya konservasi, khususnya pelestarian kawasan TNGGP bisa meningkat. Dengan demikian maka wacana “*Leuweung Hejo Masyarakat Ngejo*” (sinergitas yang baik antara keamanan hutan dan kesejahteraan masyarakat), bisa segera terwujud.

8. Indikator Kinerja Kegiatan 8: Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE Minimal 80,00 (Target KSDAE 78)



Gambar 14. Input Data Laporan SIDAK KSDAE

Sebagai instansi pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, tentunya Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango perlu didukung kapasitas kelembagaan yang memadai, proporsional dan efektif. Sebagai instansi pemerintah tentunya pula, Balai Besar Taman Nasional

Gunung Gede Pangrango perlu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya alam. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Oleh karena itu, salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai Balai Besar TNGGP pada tahun 2020, adalah mewujudkan kapasitas kelembagaan yang memadai, proporsional dan efektif, melalui **Indikator Kinerja Kegiatan ke-8**, yaitu “*Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE Minimal 80,00*”. Dari hasil penilaian indikator kinerja kegiatan tersebut di atas, Balai Besar TNGGP menginduk ke nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE (dengan nilai 88,5) tergolong dalam kategori **Memuaskan** dengan nilai capaian kinerja sebesar **110,63 %**.

Untuk mendukung realisasi kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja kegiatan ke-8 ini, digunakan anggaran sebesar Rp. 20,052,367,799,-, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 20,626,871,000,- jadi ada penghematan sebesar Rp. 574.503.201,- atau terjadi efisiensi penggunaann anggaran sebesar 2,79 %. Untuk jelasnya bisa dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Target dan Realisasi IKK Nilai SAKIP Balai Besar TNGGP Tahun 2020

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran		Efisiensi (%)
	Target	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi Rp (%)	
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE Minimal 78,00	80,00 poin	79,37 poin (99,21)	20.626.871.000,-	20.052.367.799,- (97,21)	Rp. 574.503.201,- (2,79)

Dalam rangka mensukseskan pencapaian indikator kinerja kegiatan ke-8 ini, di tahun 2020 Balai Besar TNGGP telah melaksanakan 3 (tiga) jenis kegiatan, dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kegiatan dan penggunaan anggaran untuk IKK ke-8 ini dapat dilihat pada Tabel 28 di bawah ini.

Tabel 28. Target dan Realisasi Kegiatan Pendukung IKK Nilai SAKIP Balai Besar TNGGP Tahun 2020

No.	Jenis Kegiatan	Fisik			Anggaran		
		Target	Real	% Real	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Real.
1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	15 Keg	15 Keg	100	314.871.000	312.398.300	99,21
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Keg	2 Keg	100	676.000.000	674.647.375	99,80
3.	Layanan Perkantoran	10 Keg	10 Keg	100	19.636.000.000	19.065.322.124	97,09
Jumlah		10	10	100	20.626.871.000	20.052.367.799	97,21

Seluruh kegiatan seperti tersaji pada tabel 28 di atas sangat diperlukan dalam rangka pencapaian IKK ke-8 ini. "layanan dukungan manajemen eselon I", "layanan sarana dan prasarana internal", dan "layanan perkantoran" merupakan kegiatan yang cukup penting dalam menunjang dan mensupport kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan konservasi. Hanya dengan dukungan kegiatan-kegiatan ini pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango akan berjalan, sehingga nilai SAKIP akan menjadi tinggi. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan tersebut sangat mendukung pencapaian IKK ke-8.

“Program dan Anggaran” serta “Evaluasi dan Pelaporan” merupakan kegiatan yang akan mengarahkan dan meluruskan serta perbaikan dalam pengelolaan Taman Nasional. Oleh karena itu dua kegiatan ini sangat diperlukan untuk keberhasilan pengelolaan TNGGP, dengan demikian kegiatan ini sangat diperlukan dalam pencapaian target nilai SAKIP.

Dalam perjalanannya, nilai Sakip Balai Besar TNGGP masih berfluktuasi dari tahun ke tahun seperti terlihat pada tahun 2015 sampai tahun 2019 masing-masing 90,75; 90,25; 98,25; 90,50 dan 88,50. Secara umum penyebab fluktuasi ini adalah adanya kegiatan yang tidak berkesinambungan serta munculnya indikator kinerja baru yang tidak tercantum dalam Renstra Balai Besar TNGGP maupun Renstra Ditjen KSDAE, sehingga hasilnya kurang nyambung dengan rencana strategis dan tidak bisa dibandingkan antar tahun sehingga kurang mudah melihat dinamika pembangunannya. Harapan untuk periode Renstra 2020 – 2024 antara perencanaan dalam Renstra KSDAE, Renstra Balai Besar TNGGP, Rencana Kerja Tahunan/ RPJPN, dan Penetapan Kinerja setiap tahunnya saling berkaitan sehingga capaian kinerja dapat terukur dengan jelas. Sebagai gambaran jumlah kegiatan pendukung dan nilai SAKIP di Balai Besar TNGGP dapat dilihat pada Gambar 16 di bawah ini.



Gambar 16. Grafik Jumlah Kegiatan Pendukung dan Nilai Sakip BBTNGGP Tahun 2015 – 2020

Khusus untuk tahun 2020 Nilai SAKIP karena tidak ada penilaian untuk tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) sehingga mengindikasikan ke nilai SAKIP eselon I Direktorat KSDAE sebesar 79,37. Dari Gambar 16 terlihat bahwa capaian nilai SAKIP tahun 2020 lebih kecil dari capaian tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain adanya target kegiatan yang tidak sesuai dengan target Renstra Balai Besar TNGGP dan target Renstra Ditjen KSDAE, misalnya gambaran untuk tahun 2019, nilai SAKIP target Renstra 78,00 target di Perjanjian Kinerja (PK) hanya 77,5; jumlah sanctuary target di Renstra 2 (dua) unit target di PK hanya 1 (satu) unit. Tahun 2020 pada Renstra KSDAE periode 2020 – 2024 untuk IKK “jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan Konservasi” satuannya hektare (Ha) dan untuk IKK “Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif” satuannya desa. Sedangkan pada Renstra Balai Besar TNGGP periode 2020-2024 kedua IKK tersebut digabungkan dengan satuan desa.

Tahun 2020 antara Renstra 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 2020 sudah selaras namun ada beberapa kegiatan yang belum terakomodir karena tahun 2020 terjadi penghematan sebesar 65% dan karena adanya pandemi covid-19 sehingga anggaran kegiatan pengelolaan sebesar 3,82% dari realisasi anggaran diperuntukan untuk penanganan covid-19 yaitu: 2,12% untuk pemeriksaan kesehatan, 1,69% biaya operasional penanganan covid, dan 0,01% biaya non operasional penanganan covid.

Nilai SAKIP (Indikator Kinerja Kegiatan ke-8) Balai Besar TNGGP belum mencapai target Renstra Balai Besar TNGGP tahun 2020 – 2024 yang pada tahun 2020 menargetkan 80,00. Jadi nilai capaian target Renstra Balai Besar TNGGP untuk IKK ke-8 adalah **99,21 %**.

Nilai Sakip Balai Besar TNGGP tahun 2020 mengindikasikan kepada nilai SAKIP Eselon I (Direktorat Jenderal KSDAE) karena untuk tingkat UPT tidak dilakukan penilaian. Semoga tahun selanjutnya penilaian SAKIP untuk masing-masing UPT dilaksanakan agar lebih obyektif dalam penilaiannya.

Dukungan untuk capaian Renstra DITJEN KSDAE periode 2020-2024, khususnya target Renstra di tahun 2020, dengan besar sumbangan sekitar sebesar 101,76%. Namun demikian karena nilai SAKIP ini tidak bersifat kumulatif, maka perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan setiap tahunnya.

Perolehan nilai Sakip Balai Besar TNGGP yang cukup tinggi ini, didukung beberapa hal, seperti:

- Di Balai Besar TNGGP, sudah mulai dilakukan kegiatan evaluasi setiap tahunnya, sehingga dalam pembuatan perencanaan, program, dan anggaran bisa dilakukan dengan dasar hasil evaluasi.
- Sudah dilakukan sistem pelaporan yang berbasis internet/ *online*, sehingga pelaporan kegiatan bisa berjalan lebih cepat dan lebih efisien.
- Ketersediaan data dan informasi relatif sudah banyak sehingga dalam kegiatan perencanaan, dan pengelolaan taman nasional dapat berjalan dengan lancar, demikian juga dalam pelayanan informasi pada masyarakat sudah lebih baik.
- Secara umum urusan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan layanan perkantoran sudah berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Namun masih ada beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan sasaran ini, antara lain sebagai berikut:

- Komposisi pegawai banyak yang berusia lanjut, menjelang pensiun, serta pada saat ini masih banyak tugas-tugas fungsional umum yang dikerjakan oleh pejabat fungsional tertentu (jabatan rangkap), maka perlu ditinjau dan direncanakan kembali kebutuhan SDM untuk melaksanakan tupoksi Balai Besar TNGGP meliputi jumlah, kualifikasi, komposisi dan distribusi SDM di lingkup TNGGP.
- Kedisiplinan pegawai, terutama dalam hal penyampaian pelaporan belum optimal sehingga masih perlu ditingkatkan.
- Kegiatan evaluasi kegiatan dan pemanfaatan hasil evaluasi belum optimal sehingga perlu ditingkatkan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya, agar pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango lebih baik lagi.
- Sarana dan prasarana pengelolaan masih dirasakan kurang, terutama kantor seksi wilayah dengan kelengkapannya. Saat ini baru ada dua kantor seksi wilayah, jadi masih kekurangan empat lagi.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam rangka upaya merealisasikan target IKK ke-8 ini, Balai Besar TNGGP telah melakukan berbagai upaya antara lain:

- Untuk mengatasi masalah SDM, Balai Besar TNGGP telah berusaha merekrut pegawai dari masyarakat lokal sebagai tenaga kontrak, dan menginformasikan serta mengkonsultasikan kondisi SDM ke Pusat.
- Peningkatan disiplin pegawai terus diupayakan, antara lain dalam ketepatan waktu penyampaian pelaporan untuk mendukung kinerja yang lebih optimal, bisa dilakukan dengan monitoring kegiatan dan pelaporan.
- Evaluasi kegiatan dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya, agar pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango lebih baik lagi.
- Sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan terutama untuk kelancaran tugas-tugas di tingkat seksi antara lain pembangunan kantor seksi sebanyak 6 (enam) unit dengan kelengkapan lainnya.

Dengan penerapan SAKIP pada instansi atau lembaga pemerintah memotivasi setiap lembaga untuk melakukan perbaikan. Termasuk Balai Besar TNGGP, terus termotivasi untuk selalu memperbaiki dan mengembangkan pengelolaan di berbagai tahapan, baik dalam pembuatan perencanaan (seperti Renstra, Renja, PK, RKAKL), pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam hal evaluasi dan pelaporan. Dengan demikian laju pembangunan, dalam hal ini bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, khususnya Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bisa lebih terkontrol dan bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

Disamping itu, SAKIP ini bermanfaat pula sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Besar TNGGP (sebagai instansi pemerintah) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya alam serta memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja kepada lembaga di atasnya. Dengan Sakip ini maka reformasi birokrasi menuju pemerintah yang profesional akan segera terwujud.

A.2. Realisasi Anggaran

Untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, pada tahun 2020 Balai Besar TNGGP melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional (yang didalamnya mencakup empat kegiatan dari Program Ditjen KSDAE), dengan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. **30,158,567,000,-** (Tiga Puluh

Milyar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan sumber dana terdiri dari:

Rupiah Murni	: Rp. 21,644,067,000,-
PNBP	: Rp. 3,372,500,000,-
SBSN	: Rp. 5,142,000,000,-

Secara rinci pencapaian realisasi anggaran Balai Besar TNGGP tahun 2020, disajikan pada Tabel 29 di bawah ini.

Tabel 29. Rekapitulasi Pelaksanaan Anggaran/ DIPA KSDAE Tahun 2020

No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi		
			Rp.	% Keu	% Fisik
1.	Rupiah Murni (RM)	21,644,067,000	21,064,009,435	97.32	100,00
2.	PNBP	3,372,500,000	3,364,356,213	99.76	100,00
3	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	5,142,000,000	5,138,647,000	99.93	100,00
Jumlah		30,158,567,000	29,567,012,648	98.04	100,00

Dari Tabel 29 terlihat bahwa secara umum pengelolaan Balai Besar TNGGP tahun 2020, telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian realisasi keuangan sebesar 98,04 % dan pencapaian realisasi fisik sebesar 100,00 %.

Namun ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat pencapaian anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Masih kurang matangnya perencanaan, terutama dalam hal tata waktu pelaksanaan, masih terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun.
- 2) Penelaahan perencanaan masih perlu ditingkatkan karena masih banyak dilakukan revisi RKAKL pada saat kegiatan akan dilaksanakan.
- 3) Sumber dana kegiatan pembangunan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dari PNBP pencairannya dilakukan secara bertahap, sehingga kegiatan harus ditunda sesuai turunnya surat persejuaan pencairan, sedangkan surat edaran (SE) pencairan tidak selalu

bersesuaian dengan alokasi waktu pelaksanaan yang pada akhirnya beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan atau tidak optimal dalam pelaksanaannya.

- 4) Faktor alam dan iklim sering menyebabkan kegiatan terhambat, seperti pemeliharaan Sarpras dan kegiatan lapangan.

Beberapa hal yang akan dilakukan sehubungan dengan kondisi tersebut di atas adalah:

- 1) Disusun jadwal pelaksanaan kegiatan dengan pemilahan dan penyusunan sesuai urutan kegiatan prioritas.
- 2) Mempersiapkan perencanaan kegiatan (RPK) dari awal tahun sehingga pada saat turunnya anggaran tinggal pelaksanaannya fisiknya.
- 3) Bila kondisi mengharuskan pencadangan anggaran untuk kegiatan tertentu, akan mengintensifkan konsultasi dengan Pusat, sehingga dapat diketahui seawal mungkin peluang pencairan anggaran, sehingga bila peluangnya sangat rendah bisa diantisipasi, antara lain dengan revisi RKAKL.
- 4) Distribusi kegiatan selama tahun berjalan akan diatur sedemikian rupa untuk mengantisipasi penumpukan kegiatan pada akhir tahun atau diersesuaikan dengan kondisi alam terutama cuaca.

Berdasarkan alokasi anggaran DIPA Balai Besar TNGGP Tahun 2020 per Kegiatan, maka besarnya Pagu dan Realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 30 di bawah ini.

Tabel 30. Akuntabilitas Keuangan BBTNGGP Tahun 2020

NO.	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% KEU
1	Luas Kawasan sebagai penyedia Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi	27.250.000	26.650.000	97,80
2	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	184.320.000	183.030.000	99,30
3.	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani	1.739.966.000	1.738.122.754	99,89
4.	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan	203.510.000	202.439.500	99,47

NO.	URAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% KEU
	Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif			
5.	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1.116.575.000	1.109.869.536	99,40
6.	Konservasi Spesies dan Genetik	582.675.000	582.003.000	99,88
7.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	535.400.000	533.883.059	99,72
8.	Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN	5.142.000.000	5.138.647.000	99,93
9.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	20.626.871.000	20.052.367.799	97,21
TOTAL		30.158.567.000	29.567.012.648	98,04

Dari Tabel 30 terlihat bahwa pada tahun 2020 tingkat penyerapan anggaran kegiatan di Balai Besar TNGGP sebesar 98,08%. Sumbangan dari masing-masing kegiatan relative sama berkisar antara 97,21% sampai 99,93%. Sumbangan terbesar didapat dari kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengembangan SBSN sebesar 99,93% dari IKK ke-7, disusul dengan kegiatan luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani sebesar 99,89 % dan terkecil dari kegiatan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem sebesar 97,21%.

Bila dibandingkan dengan tingkat serapan pada tahun 2020 dengan tahun 2020, terdapat sedikit penurunan dari 98,53 % (ditahun 2019) menjadi 98,04 % (ditahun 2020). Penurunan penyerapan anggaran terjadi karena salah satu faktornya dari adanya pandemi covid-19.

Namun demikian tingkat pencapaian keberhasilan kegiatan termasuk kategori **Memuaskan**.

Dilihat dari tingkat serapan anggaran ternyata pada tahun 2020, Balai Besar TNGGP sudah berhasil dengan baik pada setiap IKK dengan kisaran serapan anggaran antara 97,21 % sampai 99,93%.

Anggaran terbesar dialokasikan untuk kegiatan Dukungan Manajemen, hal ini disebabkan Balai Besar TNGGP ingin meningkatkan kemampuan pelayanan manajemen sehingga kegiatan lainnya bisa berjalan dengan lebih lancar. Urutan terbesar ke-2 dialokasikan untuk kegiatan Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN dan juga Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani. Hal ini dimaksudkan dalam rangka Membangun Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* di kawasan TNGGP. Luas *opened area* di kawasan konservasi yang ditangani pun mempunyai peranan penring dalam pemulihan ekosistem kawasan TNGGP.

Sedangkan anggaran untuk kegiatan luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi menduduki urutan terkecil, hal ini bukan berarti tidak penting. Data sangat penting dalam merencanakan pengelolaan kawasan konservasi, namun kita dapat mempergunakan data timeseries yang sudah ada sebelumnya dan memperkaya dengan aktul/ update data.

Dilihat dari realisasi penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja, Belanja Modal di Balai Besar TNGGP, menduduki tempat teratas dengan tingkat pencapaian sebesar 99,90 %, disusul Belanja Barang dengan tingkat pencapaian sebesar 99,61 % dan tingkat serapan terendah adalah Belanja Pegawai dengan tingkat capaian sebesar 96,05 %. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 31 .

Tabel 31. Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja BBTNGGP Tahun 2020

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Belanja Pegawai			96,05
	RM	13.769.110.000	13.225.860.753	96,05
2.	Belanja Barang			99,61
	RM	6.824.457.000	6.791.855.919	99,52
	PNP	3.372.500.000	3.364.356.213	99,76
3.	Belanja Modal			99,90
	RM	1.050.500.000	1.048.247.375	99,79
	SBSN	5.142.000.000	5.138.647.000	99,93
	JUMLAH	30.158.567.000	29.568.967.260	98,04

Secara umum tingkat serapan anggaran untuk enam tahun terakhir (2015 – 2020), sudah baik dan ada kecenderungan semakin membaik dari tahun ke tahun. Tingkat serapan tertinggi dicapai pada tahun 2019 sebesar 98,53 %. Untuk lebih jelasnya data tentang besar serapan dapat dilihat pada Tabel 32 di bawah ini.

Tabel 32. Besarnya Serapan Anggaran DIPA BBTNGGP Tahun 2015 – 2020

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Modal	Belanja Barang	Total
2015	98,45	93,87	96,01	96,37
2016	98,27	94,99	97,32	97,64
2017	80,63	94,43	97,86	88,67
2018	99,44	98,69	95,67	98,25
2019	99,84	99,77	96,26	98,53
2020	96,05	99,90	99,61	98,04

Dari Tabel 32 terlihat bahwa serapan paling tinggi dan berkecenderungan naik pada kegiatan pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango adalah belanja pegawai dan belanja modal. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah pegawai dan kenaikan pangkat, sehingga kebutuhan akan belanja pegawai cenderung semakin tingginya untuk membiayai gaji dan tunjangan kinerja pegawai. Begitu juga dalam belanja modal tahun 2020 ada pembangunan sarana dan prasarana DPP Model SBSN yaitu Pusat Pendidikan Konservasi Elang Jawa Cimungkad.

Bila dilihat dari perbandingan serapan belanja modal dan belanja barang, dari tahun-tahun sebelumnya belanja barang relatif lebih besar dari pada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar Taman Nasional sudah berkembang dan terus mengembangkan diri untuk mempercepat pencapaian tujuan pengelolaan Taman Nasional dan mengejar visi pengelolaan. Namun pada tahun 2020, serapan belanja modal kembali naik, yang disebabkan karena pada tahun ini, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ingin lebih meningkatkan layanan manajemen untuk memperlancar kegiatan lainnya sehingga diperlukan sarana dan prasarana pendukungnya dan adanya pembangunan sarana dan prasarana DPP Model SBSN yaitu Pusat Pendidikan Konservasi Elang Jawa Cimungkad dalam rangka capaian

IKK “Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* sebanyak 1 destinasi”.

B. Capaian Indikator Tujuan

Secara umum Capaian Indikator Tujuan untuk tahun ke-1 priode Renstra 2020-2024 Balai Besar TNGGP telah sudah baik, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, rata-rata capaian (output) sebesar 118,65 %. Secara rinci tingkat Capaian Indikator Tujuan sebagai berikut:

Tabel 33. Capaian Indikator Tujuan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian %
1.	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi seluas 4.935 Ha	100,00
2.	Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan sebanyak 1 Dokumen	150,00
3.	Luas <i>opened area</i> di kawasan konservasi yang ditangani seluas 50 Ha	100,00
4.	Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif sebanyak 1 desa	150,00
5.	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sebanyak 1 kawasan konservasi	100,00
6.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 8 Ha	150,00
7.	Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i> sebanyak 1 destinasi	100,00
8.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 80 poin	99,21
Capaian Rata-rata		118,65

C. Capaian Kegiatan Prioritas Nasional

Secara umum Capaian Kegiatan Prioritas Nasional tahun ke-1 priode Renstra 2020 – 2024 Balai Besar TNGGP telah sudah baik, sesuai dengan target yang telah ditetapkan, rata-rata capaian (output) sebesar 118,65%. Secara rinci tingkat Capaian Indikator Tujuan sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar (Percepatan Pengurangan Kemiskinan):

Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif sebanyak 1 desa terealisasi 10 desa (150%)

2. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air (Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Air):

Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sebanyak 1 kawasan konservasi terealisasi 1 unit kawasan konservasi TNGGP (100 %).

3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya (Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian):

Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif seluas 8 Ha terealisasi 33,604 Ha (150%)

4. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya (Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya):

Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education* sebanyak 1 destinasi terealisasi 1 destinasi dengan dibangunnya Pusat Pendidikan Konservasi Elang Jawa Cimungkad.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan dibuatnya Laporan Kinerja (LKj), maka Balai Besar TNGGP (instansi pemerintah) sebagai pelaksana kebijakan Pusat telah mempertanggungjawabkan salah satu tugas dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem untuk tahun anggaran 2020.
2. Pencapaian kinerja ini merupakan hasil atau capaian kinerja kegiatan Balai Besar TNGGP tahun 2020 yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (*performance agreement*), sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi, serta memberikan gambaran pencapaian target Renstra periode 2020-2024.
3. Dengan laporan ini, disamping dapat melihat tingkat keberhasilan capaian kinerja, dalam analisis capaian kinerja kegiatan terhadap rencana kinerja, juga memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang, terutama dalam pemenuhan target Renstra periode 2020-2024.
4. Secara umum, capaian kinerja kegiatan Balai Besar TNGGP untuk Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada tahun 2020, sudah memenuhi target dari rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar TNGGP dengan Direktur Jenderal KSDAE. Hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut menunjukkan **rata-rata capaian kinerja kegiatan BBTNGGP sebesar 118,65%** dan **penyerapan anggaran** sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 29.567.012.648,-** dari anggaran yang tersedia sebesar **Rp. 30.158.567.000,-** atau **98,04%**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebagian besar kinerja kegiatan pendukung pelaksanaan program telah berjalan dengan baik, terlihat dari hasil pengukuran kinerja kegiatan, diketahui bahwa tingkat capaian kinerja kegiatan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango tahun 2020 (terdapat 8 indikator kinerja kegiatan tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Balai Besar TNGGP tahun 2020) rata-rata mencapai **118,65%**. Dari nilai total rata-rata Pencapaian Kinerja Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Tahun 2020 tersebut termasuk dalam kategori **Memuaskan**. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mendukung pencapaian sasaran program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Satker Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Tahun 2020.

- b. Akuntabilitas Keuangan pada Satker Balai Besar TNGGP Tahun 2020, mencapai penyerapan anggaran (sampai dengan tanggal 31 Desember 2020) sebesar Rp. **29.567.012.648,-** atau **98,04%**, dan fisik **100,00%**. Nilai tersebut berasal dari DIPA BA 029 TA 2020 Balai Besar TNGGP dana APBN sebesar Rp. 30.158.567.000,- yang berasal dari sumber dana RM Rp. 21,644,067,000,- (dengan realisasi sebesar 97.32%), dari sumber dana PNPB sebesar Rp. 3,372,500,000,- (dengan realisasi sebesar 99.76%), dan dari sumber dana SBSN sebesar Rp 5,142,000,000,- (dengan realisasi sebesar 99.93%).
 - c. Berdasarkan jenis belanja dari pagu total anggaran sumber dana APBN terealisasi : Belanja Pegawai sebesar Rp. 14.545.450.000,- (99,84%), Belanja Barang sebesar Rp. 8.542.347.000,- (96,26%) dan Belanja Modal sebesar Rp. 250.000.000,- (99,77%).
5. Pencapaian kinerja dan akuntabilitas keuangan ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2020, Balai Besar TNGGP sudah sangat baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai taman nasional. Dari komposisi anggaran dan serapannya, terlihat bahwa tingkat pengelolaan TNGGP sedang berupaya untuk meningkatkan pengelolaan terutama dalam pelayanan publik (belanja modal untuk Sarpras lebih tinggi dari belanja barang).
 6. Dalam hal capaian target Renstra TNGGP (periode 2020-2024), kinerja Balai Besar TNGGP sampai dengan tahun 2020 sebesar 118,65%.

B. Saran

1. Kegiatan yang targetnya tidak tercapai pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahun 2020 agar diusulkan sebagai Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahun selanjutnya.
2. Untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program, maka penentuan indikator kinerja kegiatan harus diusahakan mengikuti indikator kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renstra (baik Renstra Satker maupun Renstra eselon I nya).
3. Agar tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun, perlu pengaturan penjadwalan kegiatan disesuaikan dengan prioritas.
4. Dalam penyusunan perencanaan, khususnya penyusunan RKAKL, agar lebih cermat sehingga pada saat kegiatan tidak diperlukan revisi. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan instansi luar perlu dilaksanakan koordinasi sejak awal mungkin agar pada pelaksanaannya tidak terjadi masalah.
5. Untukantisipasi telatnya pencairan anggaran, khususnya dari sumber dana PNBK, dalam penyusunan jadwal kegiatan harus disesuaikan dengan kegiatan yang prioritas atau kegiatan yang harus dilaksanakan di awal tahun didanai dari sumber anggaran Rupiah Murni (RM), yang lainnya bisa dari sumber dana PNBK.
6. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan mencapai target yang telah direncanakan secara optimal, diperlukan ada mekanisme yang memungkinkan pencairan anggaran bisa turun tepat waktu, terutama sumber dana PNBK.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Renstra Balai Besar TNGGP Tahun 2020 –2024

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Lampiran 3. Matrik Renja Balai Besar TNGGP Tahun 2020



Lampiran 1. : Matrik Rencana Strategi Balai Besar TN. Gunung Gede Pangrango

Tahun : 2020 - 2024

Program/Kegiatan : Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Pengelolaan Taman Nasional

Sasaran Kegiatan : Terjaminnya Efektifitas Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Kode	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Sasaran Program 1 : Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati														
IKP.1	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Hektar												
IKK.1	Luas KK sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di Dalam Kawasan Konservasi Darat dan Perairan	Hektar												
a	Pemetaan potensi keanekaragaman hayati		2000 Ha	5000 Ha	5000 Ha	5000 Ha	5000 Ha	100	250	250	250	250	BBTNGGP	BW
b	Updating data keanekaragaman hayati			15 Resort	15 Resort	15 Resort	15 Resort		300	300	300	300	BBTNGGP	BW
c	Monitoring populasi macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa			15 Resort	15 Resort	15 Resort	15 Resort		375	375	375	375	BBTNGGP	BW
d	Monitoring habitat macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa			15 Resort	15 Resort	15 Resort	15 Resort		375	375	375	375	BBTNGGP	BW
e	Monitoring kecukupan satwa mangsa macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa			15 Resort	15 Resort	15 Resort	15 Resort		375	375	375	375	BBTNGGP	BW
f	Pembinaan habitat macan tutul, owa jawa, surili dan elang jawa			15 Resort	15 Resort	15 Resort	15 Resort		375	375	375	375	BBTNGGP	BW
g	Membangun jejaring kerja dan kemitraan penelitian			4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg		100	100	100	100	BBTNGGP	Balai dan BW
h	Peningkatan kapasitas SDM		1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	40	40	40	40	40	BBTNGGP	Balai



Kode	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dalam monitoring Keanekaragaman hayati													
i	Melakukan kajian daya dukung			1 Kali		1 Kali			100		100		BBTNGGP	Balai
j	Penyusunan dokumen perencanaan wisata alam			1 Keg		1 Keg			300		300		BBTNGGP	Balai
IKK.2	Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	Hektar												
a	Perlindungan dan pengaman kawasan		22.000 Ha	22.000 Ha	22.000 Ha	22.000 Ha	22.000 Ha	2000	2000	2000	2000	2000	BBTNGGP	Kawasan BBTNGGP
IKK.3	Jumlah Luas area KK yang ditangani melalui kemitraan & Pemulihan Ekosistem	Hektar												
a	Pemulihan Ekosistem		400 Ha	400 Ha	400 Ha	400 Ha	400 Ha	400	400	400	400	400	BBTNGGP	BW
Sasaran Program 3 : Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari														
IKP.3	Jumlah Nilai PNPB dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	Rupiah												
IKK.1	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Rupiah												
a	Membangun dan mengelola sanctuary Elang Jawa		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5000	150	150	150	150	BBTNGGP	Bidang II
b	Mengelola 1 unit sanctuary Owa Jawa		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	200	200	200	200	200	BBTNGGP	Bidang III Bogor
c	Pembuatan Demplot penangkaran dan pemanfaatan 2 jenis kehati untuk kesejahteraan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit		100	100	100	100	BBTNGGP	Balai dan BW



Kode	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	masyarakat													
IKK.2	Jumlah unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	Unit												
a	Monitoring debit air		3 unit/ resort	3 unit/ resort	3 unit/ resort	3 unit/ resort	3 unit/ resort	100	100	100	100	100	BBTNGGP	Seluruh Bidang Wilayah
b	Sosialisasi pemanfaatan air		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	25	25	25	25	25	BBTNGGP	Bidang Teknis
c	Pembentukan dan pembinaan kelembagaan pemanfaatan air			1 Unit	1 Unit	1 Unit			25	25	25		BBTNGGP	Seluruh Bidang Wilayah
Sasaran Program 4 : Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi														
IKP.4	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa												
IKK.1	Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa												
a	Membina masyarakat menjadi Intepreter profesional			1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa		20	20	20	20	BBTNGGP	BW
b	Kerjasama pemanfaatan HHBK di Zona Tradisional			1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa		20	20	20	20	BBTNGGP	BW
c	Peningkatan kapasitas masyarakat			1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa		30	30	30	30	BBTNGGP	BW
d	Pengembangan daerah			1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa		20	20	20	20	BBTNGGP	BW



Kode	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	penyangga dengan materi kehati TNGGP													
e	Pembinaan masyarakat pendukung wisata alam			1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa		20	20	20	20	BBTNGGP	BW
f	Menjalin kerjasama penelitian terkait pemanfaatan 2 jenis kehati untuk kesejahteraan masyarakat			1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa		10	10	10	10	BBTNGGP	BW
g	Pengembangan jejaring kerja dan kelompok pembelajar			1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa		10	10	10	10	BBTNGGP	BW
Sasaran Program 5 : Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi														
IKP.5	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KK												
IKK.1	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KK												
a	Meningkatkan sarana prasarana pendidikan konservasi		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100	BBTNGGP	Balai dan BW
b	Pendidikan Konservasi dan Lingkungan (DIKOLING)		3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	30	30	30	30	30		Balai dan BW
c	Penyuluhan		1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	10	10	10	10	10	BBTNGGP	Balai Besar
d	Membentuk Kader Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat			3 Kali					45				BBTNGGP	Seluruh BW
e	Pengadaan Sarana Prasarana Wisata Alam yang ramah pada penyandang difabel			1 Paket					200				BBTNGGP	Seluruh Resort Wisata
f	Penerapan ISO 14001-2015			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket		200	200	200	200	BBTNGGP	Balai
g	Promosi dan penyadartahuan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	150	150	150	150	150	BBTNGGP	Balai



Kode	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	Lokasi
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	masyarakat													
h	Penyempurnaan system pelayanan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	100	100	100	100	BBTNGGP	Balai
i	Penyempurnaan SOP keamanan pendakian			1 Kali		1 Kali			25		25		BBTNGGP	Balai
j	Pengadaan sarpras pendakian berstandar internasional dan ramah pada penyandang difabel				1 Paket					100			BBTNGGP	Balai
k	Penegakan hukum terhadap pendaki illegal			1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	10	10	10	10	10		
l	Penyadartahuan pendaki terkait sampah			1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	25	25	25	25	25		
m	Menyusun SOP pengelolaan TNGGP berbasis pendidikan konservasi			1 Kali				30						

Lampiran 2: Perjanjian Kinerja Tahun 2020

PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Mei 2020

Kepala Balai Besar TNGGP,


Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001

**PERNYATAAN PENJANJIAN KINERJA
SATUAN KERJA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Mei 2020

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Ir. Wiratno, M.Sc
NIP. 19620328 198903 1 003


Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Tahun Anggaran : 2020

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET AWAL	TARGET SETELAH PENGHEMATAN 65% RM NON OPS
1	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 80 poin	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 951-Layanan Internal (Overhead) 954-Layanan Perkantoran	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
2	Terjaminnya efektivitas penolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam	1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi 2. Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan 3. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantauan (prakondisi) status dan fungsi	002. Luas Kawasan sebagai penyediaan Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi 003. Dokumen Penolaan Kawasan Konservasi 004. Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi 007. Forest Programme III (Direktorat PIKA) 001. Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya 010. Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Lenseir Ecosystem 011. Forest Programme II Sumatera	4.935 Ha 1 Dokumen - - 150 Ha - -	4.935 Ha 1 Dokumen - - 50 Ha - -
3	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	1. Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani			

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET AWAL	TARGET SETELAH PENGHEMATAN 65% RM NON OPS
4	Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik	2. Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan komitmen konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	002. Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa	1 Desa
		3. Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolannya	003. Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolannya	1 Unit KK	1 Unit KK
		004. Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi	004. Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi	-	-
		001. Luas kawasan hutan yang dinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	001. Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	12 Ha	8 Ha
5	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi	2. Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	002. Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	-	-
		3. Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	003. Dokumen Perlindungan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	-	-
		4. Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati	003. Dokumen Perlindungan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	-	-
		5. Jumlah Pusat Perlindungan dan Penyelamatan Satwa Liar yang dibangun	003. Dokumen Perlindungan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	-	-
		1. Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i>	001. Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	1 Destinasi	1 Destinasi
		2. Jumlah destinasi wisata alam bahari	004. Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN	1 Unit	1 Unit
			001. Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan (TN/TWA Laut)	-	-

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET AWAL	TARGET SETELAH PENCIHEMATAN 65% RM NON OPS
6	Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	3. Jumlah unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	002. Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	1	1
		4. Jumlah destinasi wisata alam prioritas	001. Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan (sesuai lokasi yang ditargetkan di dalam Renstra)	1	1
6	Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	1. Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi 2. Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolannya	003. Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	1	1
			005. Forest Investment Program - Project 1 (FIP-1)	1	1
			001. Luas Kawasan sebagai penyediaan Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	1	1
6	Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	1. Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi 2. Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolannya	002. Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolannya	1	1
			003. Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial	1	1

Kegiatan :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
2. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
3. Pengelolaan Kawasan Konservasi
4. Konservasi Spesies dan Genetik
5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi
6. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Anggaran :

Rp. 20.626.871.000.-

Rp. 211.570.000.-

Rp. 3.060.051.000.-

Rp. 582.675.000.-

Rp. 5.677.400.000.-

Rp. 0.-

Jakarta, Mei 2020
Kepala Balai Besar TNGGP,

Direktur Jenderal,



Dr. Wahyu Rudianto, M.Sc.
NIP. 19620328 198903 1 003

Wahju Rudianto, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001

RENCANA AKSI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SATUAN KERJA

Unit Organisasi Eselon I
Unit Satuan Kerja
Tahun Anggaran

: Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
: Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
: 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 80 poin	Target : - Tahapan : 1. Pengelolaan Keuangan dan Kepegawaian 2. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan	Target : - Tahapan : 1. Pengelolaan Keuangan dan Kepegawaian 2. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan 3. Pengadaan Barang dan Jasa	Target : - Tahapan : 1. Pengelolaan Keuangan dan Kepegawaian 2. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan 3. Pengadaan Barang dan Jasa	Target : 80 Poin Tahapan : 1. Pengelolaan Keuangan dan Kepegawaian 2. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
2.	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan Kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam	1. Luas kawasan hutan yang dinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi 2. Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan	Target : - Tahapan : 1. Penataan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi	Target : - Tahapan : 1. Penataan Zonasi/Blok Kawasan Konservasi 2. Kerjasama di Kawasan Konservasi	Target : 1 Dokumen Tahapan : 1. Kerjasama di Kawasan Konservasi	Target : 4.935 Ha Tahapan : 1. Rekomendasi pemantauan (monitoring) dan pemantauan fungsi KK melalui Rakor CBC

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1	2	3	4	5	6	7
3.	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	1. Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani 2. Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Target : - Tahapan : 1. Persiapan Kegiatan Pemulihan Ekosistem 2. Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem	Target : - Tahapan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem	Target : 50 Ha Tahapan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem	
			Target : - Tahapan : 1. Pemberian Akses Kelola kepada Masyarakat di sekitar KK	Target : - Tahapan : 1. Pemberian Akses Kelola kepada Masyarakat di sekitar KK 2. Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	Target : 1 Desa Tahapan : 1. Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa	
		3. Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolannya	Target : - Tahapan : 1. Perencanaan kelola Kawasan Konservasi 2. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	Target : - Tahapan : 1. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	Target : - Tahapan : 1. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi	Target : 1 Unit KK Tahapan : 1. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi
4.	Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik	1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	Target : - Tahapan : 1. Persiapan pelaksanaan manajemen TSL 2. Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan	Target : - Tahapan : 1. Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan	Target : 8 Ha Tahapan : 1. Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12
1	2	3	4	5	6	7
5.	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan Konservasi	1. Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i>	Target : - Tahapan : 1. Peningkatan Pengelolaan Jasa Wisata Alam berbasis masyarakat 2. Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam	Target : - Tahapan : 1. Peningkatan Pengelolaan Jasa Wisata Alam berbasis masyarakat 2. Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam 3. Pembangunan Sarana Prasarana Ekowisata Model SBSN	Target : 1 Destinasi Tahapan : 1. Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam 2. Pembangunan Sarana Prasarana Ekowisata Model SBSN	Target : 1 Unit SBSN (*) Tahapan : 1. Pembangunan Sarana Prasarana Ekowisata Model SBSN

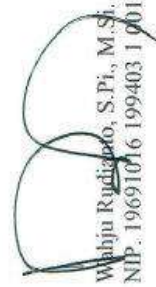
Keterangan :

(*) = Relaksasi Pelaksanaan Kegiatan SBSN mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan RI

No. S-283/MK.08/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pelaksanaan Pembangunan

Proyek Melalui SBSN Dalam Situasi Darurat Bencana Wahah Covid-19

Jakarta, Mei 2020
Kepala Balai Besar TNGGP,


Wahju Rudizato, S.Pi., M.Si.
NIP. 19691016 199403 1 001



Lampiran 3. Matrik Renja Balai Besar TNGGP Tahun 2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Keluaran Output	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Pagu Anggaran
029.05.08-Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem									33.888.016.000
1	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam								220.550.000
	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam								
	002-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi	Luas KK sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di Dalam Kawasan Konservasi	4935 Ha	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Penataan Kawasan Hutan	Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional)		27.250.000
	003-Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1 Dokumen	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Penataan Kawasan Hutan	Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional)		193.300.000
	004-Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		-
	007-Forest Programme III (Direktorat PIKA)		0%	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas		-
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi								5.789.076.000
	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru								
	001-Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya	Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya	150 Ha	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya	Pemulihan dan konservasi daerah tangkapan air		3.887.716.000



002-Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di pesisir dan laut	2 Desa	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Penataan Kawasan Hutan	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional Berbasis Desa	251.360.000
003-Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	2 Unit KK	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya	Pemulihan dan konservasi daerah tangkapan air	1.650.000.000
004-Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi		0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	-
010-Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	-
011-Forest Programme II Sumatera	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	-
3 Konservasi Spesies dan Genetik							804.750.000
Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetic							
001-Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	12 Ha	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	804.750.000



002-Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan TSL yang telah memenuhi persyaratan ekspor	0	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir	Optimalisasi Hasil Hutan	0
003-Dokumen Perlindungan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	0
Lingkungan Kawasan Konservasi							5.787.000.000
a efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi							



001-Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	Jumlah destinasi yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	1 Destinasi	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 11 Destinasi Pariwisata Potensial	645.000.000
002-Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam	0	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Penataan Kawasan Hutan	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional Berbasis Desa	0
003-Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	0
004-Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN	Jumlah destinasi yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	1 Unit	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 11 Destinasi Pariwisata Potensial	5.142.000.000
005-Forest Investment Program - Project 1 (FIP-1)	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	0



5	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial							
	Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial							
	001-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	0	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Air	Penataan Kawasan Hutan	Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa	0
	002-Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	0	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Air	Penataan Kawasan Hutan	Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa	0
	003-Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	0	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	0
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem							21.286.640.000
	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE							
	950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L	1 Layanan	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	874.640.000
	951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	1 Layanan	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	776.000.000
	994-Layanan Perkantoran	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Layanan	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	Non Prioritas	19.636.000.000

